



**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY*, DAN MANAJEMENLABA
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN
SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2013-2017**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Nurul Fitriana
0221 15 223

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

MEI2019

ABSTRAK

Nurul Fitriana. 022115223. Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Pembimbing: Joko Supriyanto dan Wiwik Budianti. 2019.

Tujuan perusahaan yang berorientasi pada laba tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan negara yaitu dengan mengenakan pajak pada laba perusahaan. Akibatnya, timbul pemikiran bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak agar dapat mengurangi beban pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah *corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan manajemen laba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 13 perusahaan. Metode penarikan sampling menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kuantitatif dengan jenis penelitian verifikatif *explanatory survey*. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dan variabel manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit & kepemilikan manajerial dan variabel *corporate social responsibility* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility*, dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Manajemen Laba

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE
SOSIAL RESPONSIBILITY*, DAN MANAJEMEN LABA
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN
SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2013-2017**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE
SOSIAL RESPONSIBILITY*, DAN MANAJEMEN LABA
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN
SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2013-2017**

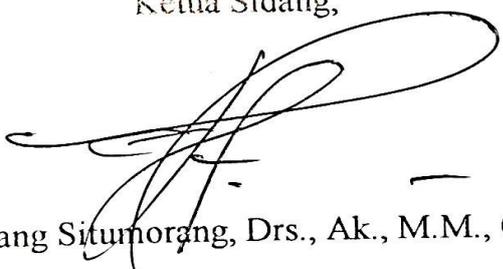
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Kamis, Tanggal : 16 / 05 / 2019

Nurul Fitriana
0221 15 223

Menyetujui

Ketua Sidang,


(Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing


(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CFA., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing


(Wiwik Budianti, S.E., Msi.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Sosial Responsibility*, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017”.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang senantiasa memberikan doa dan motivasi yang sangat berharga selama ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
4. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
5. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan motivasi.
6. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CFrA., CA., selaku ketua komisi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Wiwik Budianti, S.E., Msi., selaku wakil ketua komisi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kak Nurus dan Kak Shiva yang telah membantu memberi masukan dan ilmunya.
9. Rekan-rekan PT Terserah Kita Tbk (Ria, Dewi, Maureen, Marsha, Iyun), yang telah memberikan doa & dukungan dan terima kasih atas kebersamaannya selama menjalani masa-masa kuliah.
10. Vera, Dila, Vergi, terima kasih sudah menjadi teman terbaik yang selalu ada dan mau direpotkan selama proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan bimbingan Pak Joko dan Bu Wiwik Club, *keep spirit* yang belum acc, ingat bahwa perjuangan membuahkan hasil.
12. Teman-teman kelas F jurusan akuntansi angkatan 2015 yang telah memberikan doa dan dukungannya.
13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2015 yang telah memberikan pengalaman organisasi bagi penulis.
14. Dan seluruh pihak yang sudah membantu, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Bogor, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HAK CIPTA	iii
LEMBAR PENGESAHAN PRODI AKUNTANSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Maksud Penelitian	8
1.3.2. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Kegunaan Praktik	9
1.4.1. Kegunaan Akademis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Studi Pustaka	10
2.1.1. Definisi Pajak	10
2.1.2. Agresivitas Pajak.....	10
2.1.3. <i>Corporate Governance</i>	13
2.1.4. <i>Corporate Social Responsibility</i>	16
2.1.5. Manajemen Laba	19
2.2. Penelitian Sebelumnya	21
2.3. Kerangka Pemikiran	28
2.3.1. Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas pajak.....	29
2.3.2. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	30
2.3.3. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	31
2.4. Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	33
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	33
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	37
3.6. Metode Pengumpulan Data	38
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data	38

3.7.1.	Uji Statistik Deskriptif	38
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik	38
3.7.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.7.4.	Uji Hipotesis	40
BAB IV PEMBAHASAN.....		42
4.1.	Hasil Pengumpulan Data	42
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.2.	Data <i>Corporate Governance</i> Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017..	47
4.1.3.	Data <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.....	51
4.1.4.	Data Manajemen Laba (DA) Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013- 2017.	53
4.1.5.	Data Agresivitas Pajak (ETR) Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.....	54
4.2.	Analisis Data	56
4.2.1.	Uji Statistik Deskriptif	56
4.2.2.	Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	60
4.2.4.	Uji Hipotesis	62
4.3.	Pembahasan	64
4.3.1.	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.....	64
4.3.2.	Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.....	65
4.3.3.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.....	65
4.3.4.	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.....	65
4.3.5.	Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.....	65
4.3.6.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017..	66
4.4.	Interpretasi Hasil Penelitian	66
4.4.1.	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak .	66
4.4.2.	Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.....	67
4.4.3.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.....	67
4.4.4.	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	68
4.4.5.	Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	69

4.4.6. Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Simpulan.....	71
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	1
Tabel 2 Pengukuran Tarif Pajak Efektif (ETR)	13
Tabel 3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 5 Daftar Sampel	37
Tabel 6 Proses Seleksi Sampel.....	42
Tabel 7 Daftar Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Menjadi Sampel.....	43
Tabel 8 Data perhitungan Dewan Komisaris Independen.....	48
Tabel 9 Data Perhitungan Komite Audit.....	49
Tabel 10 Data Perhitungan Kepemilikan Manajerial.....	50
Tabel 11 Data Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i>	52
Tabel 12 Data Perhitungan Manajemen Laba.....	53
Tabel 13 Data Perhitungan Agresivitas Pajak.....	55
Tabel 14 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 15 Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	58
Tabel 16 Hasil Uji Multikolinieritas	58
Tabel 17 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 18 Hasil Uji Run test.....	60
Tabel 19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	61
Tabel 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 21 Hasil Uji t.....	63
Tabel 22 Hasil Uji F.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Rata-rata ETR, KI, KA, KM, CSR dan DA.....	6
Gambar 2 Konstelasi Penelitian	31
Gambar 3 <i>Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan Kepemilikan Manajerial secara Bersama-sama Berpengaruh pada Agresivitas Pajak.....	32
Gambar 4 Grafik Rata-rata Komisaris Independen.....	48
Gambar 5 Grafik Rata-rata Komite Audit.....	50
Gambar 6 Grafik Rata-rata Kepemilikan Manajerial.....	51
Gambar 7 Grafik Rata-rata <i>Corporate Social Responsibility</i>	52
Gambar 8 Grafik Rata-rata Manajemen Laba.....	54
Gambar 9 Grafik Rata-rata Agresivitas Pajak.....	55
Gambar 10 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram.....	57
Gambar 11 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plot	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Perhitungan Dewan Komisaris Independen
- Lampiran 2 Data Perhitungan Komite Audit
- Lampiran 3 Data Perhitungan Kepemilikan Manajerial
- Lampiran 4 Pengungkapan CSR Sektor Perdagangan
- Lampiran 5 Pengungkapan CSR Sektor Jasa
- Lampiran 6 Pengungkapan CSR Sektor Investasi & Lainnya
- Lampiran 7 Data Perhitungan *Corporate Social Responsibility*
- Lampiran 8 Data Keuangan
- Lampiran 9 Data Perhitungan Manajemen Laba (*Non-Discretionary Accruals*)
- Lampiran 10 Data Perhitungan Manajemen Laba (*Discretionary Accruals*)
- Lampiran 11 Data Perhitungan Agresivitas Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana salah satu penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak. Di tahun 2018, Ditjen Pajak ditargetkan mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.424 triliun, jauh lebih tinggi dari target 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Padahal untuk 2017, Ditjen Pajak belum mampu mengumpulkan pajak secara *full* (Sembiring, 2018). *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) pun sudah memprediksi penerimaan pajak untuk tahun 2018 hanya mencapai 92% dari target APBN (Putera, 2018).

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

No	Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Pencapaian (%)
1	2013	Rp 995,21	Rp 921,27	92,57
2	2014	Rp1.072,37	Rp 981,83	91,56
3	2015	Rp1.294,26	Rp1.060,83	81,96
4	2016	Rp1.355,20	Rp1.105,81	81,60
5	2017	Rp 1.283,6	Rp1.151,13	89,68

Sumber: Pajak.go.id, 2016-2017

Dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak belum pernah mencapai angka 100%. Tercatat, terakhir kali pemerintah mencapai target adalah di tahun 2008 yaitu sebesar Rp571 triliun atau 106,7% dari target Rp535 triliun. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo menyebutkan, “Alasannya itu ada dua, yang pertama sejak 2008 itu memang cenderung menurun, pada 2010-2014 itu karena penurunan harga komoditas, lalu 2015 ke sini targetnya ketinggian ini yang membuat penerimaan sulit tercapai” (Kusuma, 2017). Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) dalam Latifah (2018) menyatakan bahwa karena belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan agresivitas pajak, atau memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan negara maupun daerah.

Banyak perusahaan di Indonesia yang sudah tergolong menjadi wajib pajak dan mempunyai kewajiban membayar dan melaporkan pajak yang perhitungannya diperoleh dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan negara. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan

tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013).

Menurut Frank et al (2009) bahwa untuk mengurangi beban perusahaan, tidak menutup kemungkinan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Sari dan Martani (2010) menyebutkan jika perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif bisa jadi memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif. Risiko tersebut dapat berupa ancaman sanksi atau denda, turunnya harga saham (Ardy dan Kristanto, 2016). Di dalam Undang-undang PPh yang berlaku hingga saat ini, belum ada definisi yang menjelaskan tentang agresivitas pajak. Namun, menurut Frank (2009) dalam Listika Sari (2017) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Dengan tidak terikat dengan Undang-undang, sehingga menurut sebagian perusahaan mungkin sah-sah saja untuk melakukan penghematan pajak selama tidak melanggar peraturan. Berbeda dengan pemerintah, jika banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tentunya akan merugikan negara, karena bisa jadi itu alasan tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Ada banyak kasus yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia atas perusahaan yang dianggap melakukan agresivitas pajak baik dengan cara *tax avoidance* atau *tax evasion* termasuk pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi. Pada tahun 2010, banyak pemberitaan media yang mengungkap bahwa pemilik perusahaan retail PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, Paulus Tumewu diduga telah melakukan penggelapan pajak. Paulus ditangkap Polri bersama Ditjen Pajak pada 31 agustus 2005, ia dituduh melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf (c) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena mengecilkan pendapatan yang diterima Ramayana hingga negara dirugikan Rp399 miliar. Namun setelah diselidiki, Paulus memiliki utang pajak hanya senilai Rp7,99 miliar. Dan pada tahun 2006, Kejaksaan Agung, Abdulrahman Saleh, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) berdasarkan rekomendasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus tersebut karena Paulus bersedia membayar tunggakan pajaknya beserta denda 400 persen (Merdeka.com).

Pada tahun 2008, perusahaan multimedia PT First Media Tbk terlibat skandal manipulasi pajak bernilai Rp100 miliar dengan tersangka tiga oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Modus praktik curang ketiga tersangka, yakni menyulap jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Misalnya jumlah pajaknya yang

seharusnya dibayar, oleh ketiganya diturunkan jumlah kewajiban bayar pajaknya. Kasus tersebut berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya transfer uang sebesar 500 ribu dollar AS (sekitar Rp4,5 miliar) ke rekening sebuah bank BUMN atas nama Yudi Haryadi. Yudi sendiri sebelumnya sebagai pemeriksa di Kanwil Khusus Jakarta. Dari laporan itulah, Polda Jabar melakukan penyidikan. Bukti-bukti yang diperoleh menunjukkan, transfer uang tersebut diduga terkait dengan manipulasi pajak layanan televisi berlangganan kabel vision di bawah naungan PT First Media Tbk. Susno yang pernah menjabat Wakil Kepala PPATK mengatakan, “baru pertama di Indonesia terbongkar. Pajak Rp100 miliar cukup bayar Rp25 miliar. Yang Rp75 miliar cingcailah.” (Kompas.com)

Pada tahun 2016, bocoran data yang berjudul Panama Papers menjangkau Indonesia. Skandal terungkapnya upaya pengemplangan pajak serta pencucian uang ini turut mencakup perusahaan dari tanah air. Panama Papers diyakini bakal menggegerkan tataran global. Sedikitnya 12 kepala negara, baik presiden ataupun perdana menteri yang masih menjabat maupun yang sudah lengser, tersangkut bocoran data ini karena mengemplang pajak. Data-data Panama ini sudah diverifikasi oleh 70 reporter untuk memastikan keasliannya sejak 2015. Data pencucian uang para pesohor ini mencapai 11,6 juta dokumen yang dibocorkan dari firma hukum internasional Mossack Fonesca (Merdeka.com). Salah satu pengusaha sukses di Indonesia, yakni Sandiaga Uno yang merupakan mantan pemilik PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, juga masuk dalam daftar Panama Papers. Dalam pernyataannya di *Kompas.com*, Sandi membenarkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk memiliki sejumlah perusahaan *offshore* seperti yang disebutkan “Panama Papers”. Namun Sandi menjelaskan bahwa perusahaannya mendirikan perusahaan *offshore* karena iklim investasi di Indonesia belum memadai seperti di negara-negara yang sering disebut *tax heaven*. Ia menyebut sejumlah keuntungan menggunakan jasa Mossack Fonesca ialah seperti proses perizinan yang cepat dan hukum yang pasti di negara tempat perusahaan terdaftar. Namun belum diketahui secara pasti apakah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak, karena belum ada penyelidikan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kasus Panama Papers yang melibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, *corporate governance*, *corporate sosial responsibility*, dan manajemen laba. Maharani dan Suardana (2014) dalam Latifah (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Timothy (2010) dalam Andrean (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat menekan tingkat agresivitas pajak, oleh karena itu semakin bagusnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Untuk mengetahui pengaruh *corporate*

governance terhadap agresivitas pajak, peneliti menggunakan proksi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Novitasari (2017), komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas, dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku. Dengan adanya komisaris independen dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Karena dengan pengawasan oleh komisaris independen akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif pada pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2018) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2018) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Adanya pemenuhan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran inilah akan mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Listika Sari, 2017). Bradbury (2004) dalam Listika Sari (2017) menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Semakin besar ukuran komite audit, monitoring terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen bisa diminimalisir dan dapat meningkatkan keandalan dari laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardy dan Kristanto (2016), menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajerial. Jika manajer mempunyai kepemilikan perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya (Novitasari, 2017). Menurut Hardinata dan Tjakara (2013) dalam Novitasari (2017), dengan peningkatan persentase kepemilikan manajerial membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial diharapkan dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak. Dan hasil yang ditunjukkan dalam penelitian Novitasari (2017), kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Atari (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan pada pajak agresif.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Corporate Sosial Responsibility*. CSR merupakan konsep di mana perusahaan melakukan integrasi kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dengan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan konsep CSR, perusahaan perlu memperhatikan tiga aspek *triple bottom line* yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan

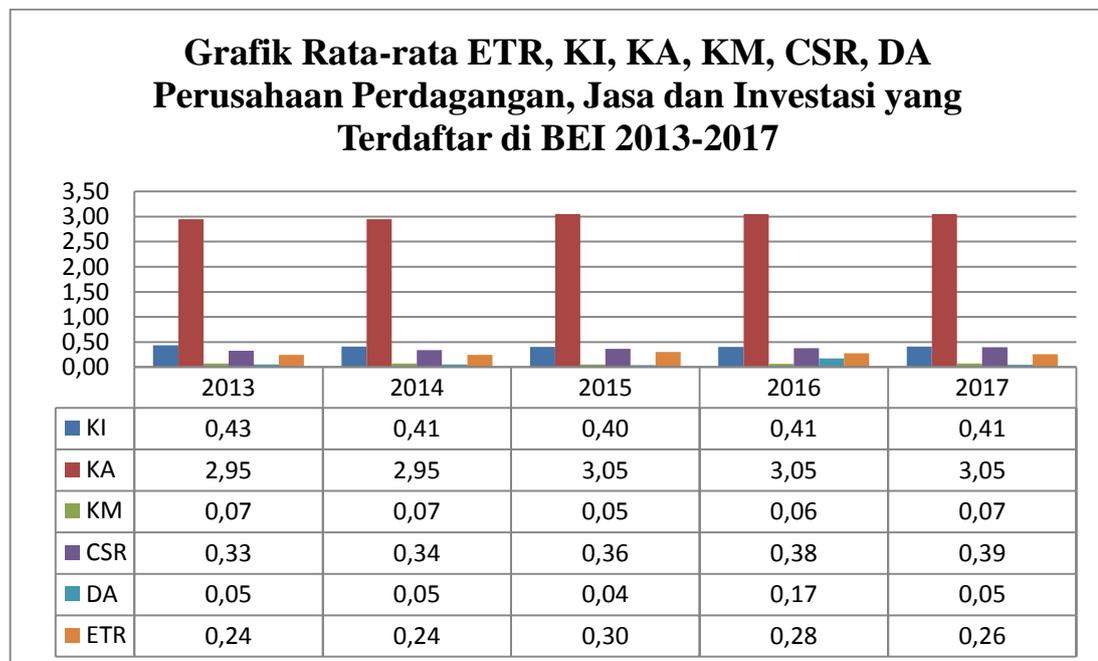
aspek ekonomi. Selain aspek lingkungan dan aspek sosial, aspek ekonomi juga harus diperhatikan. Selain harus menjaga kondisi keuangannya dengan baik, perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi dari laba yang diperolehnya, misalkan dengan memberikan donasi terhadap masyarakat, memberikan kompensasi terhadap karyawannya dan membayar pajak untuk negara. Setiap rupiah jumlah pajak yang dibayarkan, dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Kontribusi pajak bagi masyarakat dapat berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, ataupun subsidi pendidikan dan kesehatan (Cahyani, 2016). Melaksanakan CSR dan membayar pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan. Di dalam peraturan perpajakan telah diatur bahwa biaya yang dikeluarkan untuk CSR juga dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga, biaya CSR dapat dijadikan sebagai salah satu cara perusahaan dalam melakukan tindakan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajibannya tanpa melanggar peraturan.

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu manajemen laba. Semakin kecil laba yang dihasilkan maka akan semakin kecil kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Scott (2009) dalam Andrian (2018), salah satu motivasi yang mendorong manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada dasarnya manajemen laba merupakan suatu metode yang dipilih dalam penyajian informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri untuk menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan. Umumnya, perusahaan menerapkan metode akuntansi berbasis akrual yang merupakan basis akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi berdasarkan waktu terjadinya dan bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Manajer dapat mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan untuk merekayasa labanya menjadi lebih kecil. Dengan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian tentang agresivitas pajak. Dalam penelitian Cahyani (2016) membahas mengenai pengaruh manajemen laba dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan hasil menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan *Cash Effective Rate* (CETR) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan CETR. Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Fadli (2016) yang mengukur pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian Rahmawati (2018) menyimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya, berupa pelaksanaan saran-saran seperti menambahkan variabel lain

yaitu *Corporate Governance* dengan proksi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, memilih sektor lain selain perusahaan manufaktur agar perilaku agresivitas pajak di Indonesia dapat dilihat secara lebih menyeluruh, menggunakan rentang waktu yang berbeda yaitu 2013-2017, dan mengganti proksi lain untuk mengukur agresivitas pajak yakni *Effective Tax Rate (ETR)*. Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertimbangan memilih objek penelitian tersebut karena dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang memilih perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat ada tiga sektor yang berkontribusi besar untuk penerimaan pajak pada tahun 2017. Sektor itu adalah industri pengolahan, perdagangan, dan jasa keuangan. Sektor perdagangan memberi kontribusi untuk penerimaan pajak terbesar kedua yaitu sebesar 19,3%. Namun di sisi lain, ada beberapa perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terjerat kasus penghindaran pajak.



Gambar 1
Data Rata-rata ETR, KI, KA, KM, CSR dan DA

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan pengungkapan CSR, maka akan menurunkan tingkat agresivitas pajak. Rendahnya tingkat agresivitas pajak ditunjukkan dengan tingginya nilai ETR. Pada grafik di atas, gap terjadi di tahun 2014-2015, dimana rata-rata proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial mengalami penurunan, namun ETR justru mengalami kenaikan. Rata-rata jumlah komite audit untuk tahun 2015-2017 tidak mengalami perubahan, namun ETR mengalami penurunan. Di tahun 2015-2017, terjadi peningkatan pada rata-rata pengungkapan CSR, namun ETR mengalami penurunan.

Dalam teori dinyatakan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba dengan *income decreasing* (penurunan laba), maka perusahaan semakin berperilaku agresif terhadap pajak. *Income decreasing* ditandai dengan nilai *Discretionary Accruals* negatif. Namun dari grafik tahun 2013-2017 di atas, menunjukkan rata-rata perusahaan memiliki nilai nol untuk *Discretionary Accruals*nya, artinya perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola perataan laba, namun pada tahun 2013-2014 perusahaan berperilaku agresif terhadap pajak karena memiliki nilai ETR terendah.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu mengenai agresivitas pajak dengan mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Membayar pajak adalah suatu keharusan bagi setiap wajib pajak yang sudah terdaftar, terutama wajib pajak badan. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rasanya sulit sekali untuk merealisasi penerimaan pajak yang sudah ditargetkan dalam APBN. Tujuan perusahaan yang berorientasi pada laba tentunya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan negara yaitu dengan mengenakan pajak pada laba perusahaan. Akibatnya, timbul pemikiran untuk melakukan agresivitas pajak agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak.

Setiap perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki tata kelola perusahaan yang berbeda-beda. Timothy (2010) dalam Andrean (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat menekan tingkat agresivitas pajak, maka semakin bagusnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Setiap perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebut dengan *corporate social responsibility*. Biaya untuk melakukan CSR dapat digunakan sebagai beban yang diperbolehkan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga dapat meminimalisir beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen laba juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat agresivitas pajak. Semakin tinggi perusahaan dalam melakukan manajemen laba yang berupa *income decreasing*, maka semakin tinggi juga perusahaan agresif terhadap pajak.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
5. Bagaimana pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiatahun 2013-2017?
6. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba secara bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan/hubungan di antara variabel-variabel penelitian (*Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba), menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang diterima selama perkuliahan terutama ilmu perpajakan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor

perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang diprosikan dengan komite audit terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance* yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
5. Untuk menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
6. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba secara bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1.4.1. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan sebagai acuan kepada pihak-pihak terkait pengambilan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dampak dilakukannya penghindaran pajak atau penggelapan pajak pada perusahaan, serta memberikan solusi alternatif untuk mengontrol perilaku agresivitas pajak pada perusahaan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan agar penelitian ini dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah agresivitas pajak yang ada pada perusahaan khususnya di sektor perdagangan, jasa dan investasi serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat bagi para pelaku pajak.

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi perpajakan. Serta, dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya penelitian terkait *corporate governance*, *corporate social responsibility*, manajemen laba, dan agresivitas pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. Definisi Pajak

Banyak para ahli mengemukakan tentang pengertian pajak, diantaranya oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

S.I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2017:1).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa kutipandi atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pajak memiliki pengertian yang sama yaitu iuran atau kontribusi wajib dari rakyat yang dibayarkan kepada negara untuk kepentingan umum dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

2.1.2. Agresivitas Pajak

Menurut Novitasari (2017), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal guna mengecilkan beban pajaknya. Karena bagi perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:7) dalam bukunya menyatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa istilah *Tax Planning* lebih populer dibanding dengan istilah *Tax Management*.

1. Manajemen Perpajakan

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2018:13).

Terdapat beberapa fungsi manajemen perpajakan menurut Chairil Anwar Pohan (2018:13-15), diantaranya adalah:

1. *Tax Planning*

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
- b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Tax evasion adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Tax saving merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. *Tax Administration/Tax Compliance*

Tax Administration/tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

3. *Tax Audit*

Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

4. *Other Tax Matter*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan.

2. **Perencanaan Pajak**

Dalam melakukan perencanaan pajak ada beberapa manfaat yang akan diperoleh seperti yang ditulis oleh Chairil Anwar Pohan (2018:20):

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Selain manfaat yang bisa diperoleh, tentunya ada tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik (Pohan, 2018:21):

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3. **Effective Tax Rate**

Agresivitas pajak dapat dihitung dengan berbagai macam proksi pengukuran, seperti *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Book Tax Difference* (BTD), dan *Net Profit Margin* (NPM). Rego dan Wilson (2008) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa tidak ada proksi agresivitas pajak yang dapat menangkap secara sempurna adanya agresivitas pajak. Proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dapat diartikan sebagai ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Ardy dan Kristanto, 2016).

Effective Tax Rate (ETR) atau tarif pajak efektif merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif secara ringkas menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan" telah direvisi melalui penerbitan Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadisebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Jika hasil rasio di bawah 25% mengindikasikan bahwa adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Putri dan Gunawan (2017), pengukuran tarif pajak efektif terdiri dari GAAP ETR, *Current ETR*, *Long-run, Cash ETR*, dan *ETR Differential*.

Tabel 2
Pengukuran Tarif Pajak Efektif (ETR)

No.	Pengukuran	Rumus
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Total Income Tax Expenses}}{\text{Pretax Income}}$
2.	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Current Income Tax Expenses}}{\text{Pretax Income}}$
3.	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax Income}}$
4.	<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\Sigma \text{Cash Taxes Paid}}{\Sigma \text{Pretax Income}}$
5.	<i>ETR Differential</i>	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010) dalam Putri & Gunawan (2017)

Penelitian ini menggunakan GAAP ETR sebagai tarif pajak efektif karena mempengaruhi laba akuntansi. GAAP ETR merupakan variabel prediksi yang baik dalam jangka panjang karena adanya estimasi-estimasi akuntansi yang terkandung di dalamnya (Dyrenge et al., 2008 dalam Putri dan Gunawan, 2017). Pengukuran pajak pada GAAP ETR melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, termasuk pajak riil dan pajak yang tertangguh (*deffered*). Pajak yang tertangguh merupakan pajak yang akan dibayar atau dikembalikan di masa depan sebagai akibat dari perbedaan waktu pembukuan pajak.

2.1.3. *Corporate Governance*

Pengertian *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam publikasi pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (bppk.depkeu.go.id).

1. *Transparansi (Transparency)*

Dalam menerapkan asas transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan. Pengungkapan informasi tidak hanya masalah-masalah yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku

kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi karyawan, mitra bisnis, masyarakat dan pengguna produk dan jasa.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Asas responsibilitas mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan prinsip ini perusahaan akan menjadi warga masyarakat yang baik.

4. Independensi (*Independency*)

Dalam melaksanakan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen di mana masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dengan menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Organ perusahaan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Peraturan *corporate governance* telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya *corporate governance* masyarakat bisa menilai apakah perusahaan tersebut taat dalam pembayaran pajak atau tidak, dan apakah perusahaan tersebut juga melakukan penyimpangan pajak atau tidak (Listika Sari, 2017). Dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur *corporate governance* adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial.

2.1.3.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (KNKG, 2006 dalam Andrian, 2018).

Menurut Sulistyanto (2008:144-145), ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh komisaris independen, yaitu memastikan bahwa perusahaan:

- a. Memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi itu.

- b. Mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f. Prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, khususnya:
 - Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
 - Perlakuan yang adil untuk pemegang saham minoritas dan stakeholder lain.
 - Diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil.
 - Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
 - Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen yang proporsinya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak (Novitasari, 2017).

2.1.3.2 Komite Audit

Pohan (2008) dalam Ardy dan Kristanto (2016) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Sesuai dengan Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Novitasari, 2017). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit memiliki tugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Ardy dan Kristanto, 2016).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu;

- a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan

gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana dan komitmen jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Oleh karena itu, Diantari dan Ulupui (2016) dalam Latifah (2018) menyatakan bahwa komite audit dengan kewenangan yang dimiliki dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan dan dapat juga untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak.

2.1.3.3 Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Novitasari (2017), kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajerial. Kepemilikan saham oleh manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan manajer dan pemegang saham lainnya sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham lainnya, memastikan kontrak berjalan dengan lancar, dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang mana pihak manajerial sebagai pemegang saham juga.

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada perusahaan tersebut akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang telah diambil dan juga akan ikut menanggung kerugian yang terjadi apabila keputusan yang diambil salah. Dengan begitu, kepemilikan manajerial diharapkan dapat membuat pihak manajemen untuk mengesampingkan kepentingan pribadinya agar tidak terjadi *tax aggressive* (Atari, 2016).

2.1.4. *Corporate Social Responsibility*

Konsep CSR dipopulerkan pada tahun 1953 dengan diterbitkan buku yang bertajuk "*Social Responsibility of the Businessman*" karya Howard R. Bowen yang

kemudian dikenal dengan bapak CSR. Gema CSR mulai berkembang pada tahun 1960-an dimana persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai mendapat perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Perkembangan konsep CSR kemudian diperkuat pada KTT Bumi (*earth summit*), pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang harus diimplementasikan (Raharjo, 2015:6).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih dahulu dikenal di negara-negara maju sebagai *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut “CSR”) pada saat ini telah mulai diterapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua Undang-Undang ini secara tegas mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang melakukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut “GCG”), harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan yang melaksanakan tugas maupun pelaksanaan perusahaan tersebut dalam bidang sumber daya alam (Untung, 2014:1).

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* menurut Irwan Wisanggeni dan Michell Suharli dalam buku Manajemen Perpajakan (2017:157) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (2), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan yang tidak melaksanakan hal ini dapat dikenakan sanksi.

Biaya untuk melakukan CSR dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan selama dana ini berasal dari dana operasional perusahaan. Biasanya cadangan dana untuk CSR berasal dari keuntungan. Namun dana untuk melakukan tindakan CSR tidak serta merta menjadi pengurang penghasilan kena pajak, ada beberapa kriteria yang dijabarkan dalam peraturan perpajakan (Wisanggeni dan Suharli, 2017:159).

Wisanggeni dan Suharli (2017:159-161) menyebutkan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk CSR yang diakui sebagai pengurang, diantaranya adalah:

1. Pembelian bahan baku (pembinaan ke pemasok/*supplier* agar bahan baku memiliki kualitas prima)
2. Biaya pengelolaan limbah
3. Biaya penelitian dan pengembangan

4. Beasiswa, magang, dan pelatihan
5. Sumbangan dan penanggulangan bencana nasional (sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana)
6. Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan
7. Sumbangan pembangunan dalam rangka pembangunan infrastruktur sosial
8. Sumbangan untuk fasilitas pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 pasal 1 atas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dijelaskan bahwa sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial.

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

- a) Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- b) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- c) Didukung oleh bukti yang sah; dan
- d) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, mengatur jenis sumbangan yang dapat dibiayai/dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Tampubolon, 2017).

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Sumbangan dan/atau biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

2.1.4.1 CSR Disclosure

Pentingnya CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan melakukan CSR (Kamil dan Herusetya, 2012 dalam Yoehana, 2013). Menurut Mathews (1995) dalam Yoehana (2013), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Pengungkapan CSR perusahaan dilakukan melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga reputasi. Dengan mengkomunikasikan CSR, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan, sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Manfaat pengungkapan CSR adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan aksi sosial terhadap sumber daya bagi operasional usaha, dan lain-lain (Listika Sari, 2017).

2.1.5. Manajemen Laba

Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui para *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum (Sulistyanto, 2008:6).

Menurut Healy dan Wahlen dalam Sulistyanto (2008:50), manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Scott (2012) dalam Andrian (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba, yaitu:

- a. *Taking a bath*. Pola ini dapat terjadi saat ada tekanan organisasional pada saat pergantian manajemen baru. Teknik ini dilakukan dengan mengakui adanya biaya-biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan. Konsekuensinya manajemen melakukan *write off asset* dengan membebaskan

perkiraan-perkiraan biaya mendatang. Akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

- b. *Income minimization*. Pola manajemen ini hampir sama dengan *taking a bath* namun tidak terlalu ekstrim. Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil dapat berupa *write-off* atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, menggunakan metode persediaan yang dapat mengecilkan pendapatan, tujuannya yaitu untuk kepentingan pajak.
- c. *Income maximization*. Pola manajemen laba *income maximization* dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. Pola ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang, ataupun untuk menarik investor.
- d. *Income smoothing*. Perataan laba (*income smoothing*) merupakan cara yang paling populer dan sering dilakukan. Perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (*smooth*) dari periode ke periode.

2.1.5.1 Motivasi Manajemen Laba

Tentu ada alasan mengapa seorang manajer perusahaan termotivasi mengelola dan mengatur laba padahal aktivitas ini cenderung melanggar peraturan. Motivasi-motivasi inilah yang mempengaruhi pola rekayasa manajerial yang dilakukan manajer perusahaan. Artinya, bagaimana pola rekayasa ini sangat tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh manajer bersangkutan. Manajer bisa merekayasa labanya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada laba sesungguhnya tergantung motivasi apa yang mendasarinya. Demikian juga apabila manajer merekayasa laba agar cenderung selalu sama selama beberapa periode (Sulistyanto, 2008:44).

Ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus (*bonus purposes*), motivasi kontrak (*contractual motivations*), motivasi politik (*political motivations*), motivasi pajak (*taxes motivations*), pergantian *chief executive officers* (*changes of CEO*), *initial public offerings* dan mengkomunikasikan informasi ke investor (*to communicate information to investor*). Pengelompokkan ini sejalan dengan tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008:63-64), yaitu:

1. *Bonus plan hypothesis*, menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi.
Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik

tetapi juga untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer memperlakukan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal ini mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

2. *Debt (equity) hypothesis*, menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.

Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan sesungguhnya, memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasi sumber daya.

3. *Political Cost Hypothesis*, menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya.

Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang diperolehnya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.

Dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi tidak terlalu tinggi, karena manajer sebagai pengelola, tentu tidak ingin kewajiban yang harus diselesaikannya terlalu membebani.

Hal ini sangat mudah dilakukan perusahaan, yaitu dengan menarik biaya periode yang akan datang menjadi biaya periode berjalan, dan sebaliknya mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode yang akan datang. Upaya lain yang dilakukan untuk menghemat pajak adalah dengan memperlakukan laba yaitu ketika ada pergantian peraturan perundang-undangan yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah di masa depan. Perusahaan menunda pengakuan laba periode berjalan dan baru akan diakui saat peraturan baru itu diperlakukan secara efektif.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Chyntia Rahmawati (2018)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016” bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Sampel 41 perusahaan dari 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, metode *purposive sampling*. Sumber data ialah data sekunder. Metode analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian: CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Keterbatasan penelitian: hanya diwakili 2 variabel, sumber data hanya dari laporan tahunan dan laporan keuangan, peneliti melakukan scoring sendiri untuk tingkat pengungkapan aktivitas CSR, subjektif dalam menilai luas pelaporan aktivitas CSR, dan hanya dilakukan untuk periode 2012-2016. Saran untuk penelitian selanjutnya: dapat menambah variabel yang diteliti & periode penelitian, mencari indikator terbaik untuk menilai aktivitas CSR, dan menggunakan proksi lain dalam menghitung *leverage*.

2. Lana Adi Tania (2018)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2016” bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Sampel 22 perusahaan dari 50 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI, metode *purposive sampling*. Sumber data merupakan data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian: SIZE dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Naomi Malem Rehna Ginting (2018)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Telekomunikasi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Sampel 5 perusahaan dari seluruh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI, metode *purposive sampling*. Sumber data ialah data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian: *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan manajemen laba dan *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4. Novia Umi Latifah (2018)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2016)” bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. Sampel 56 perusahaan dari 136 perusahaan manufaktur, metode *purposive sampling*. Sumber data: data sekunder. Metode analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian: proporsi dewan komisaris dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara komite audit, kepemilikan institusional, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Keterbatasan penelitian: hanya meneliti perusahaan manufaktur periode 2014-2016, hanya meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, mekanisme *corporate governance* hanya terbatas pada 3 indikator, dan masih terbatasnya kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Saran untuk penelitian selanjutnya: menambah variabel penelitian, periode tahun, sampel dan objek penelitian selain perusahaan manufaktur, dan menggunakan proksi agresivitas pajak selain NPM.

5. Dea Listika Sari (2017)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Mayoritas dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari CSR, kepemilikan mayoritas, dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Sampel 69 perusahaan, metode *purposive sampling*. Sumber data adalah data sekunder. Teknik analisis data adalah multiple analisis regresi. Hasil penelitian: CSR, kepemilikan mayoritas, dan *corporate governance* berpengaruh pada agresivitas pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya: menambah sampel selain perusahaan manufaktur, menambah variabel lain, dan menambah periode tahun laporan keuangan.

6. Shelly Novitasari (2017)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014) bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, *corporate governance*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Sampel 26 perusahaan, metode *purposive sampling*. Sumber data adalah data sekunder. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian: variabel independen manajemen laba, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pajak agresif. Sedangkan kepemilikan manajerial, intensitas rapat komite audit, dan intensitas modal tidak berpengaruh pada pajak agresif. Keterbatasan penelitian:

periode pengamatan masih pendek dan hanya dilakukan pada satu sub sektor. Saran untuk penelitian selanjutnya: menggunakan sampel yang lebih luas dengan periode pengamatan lebih lama dan memasukkan perusahaan yang mengalami kerugian.

7. Ardy dan Ari Budi Kristanto (2016)

Penelitiannya berjudul “Faktor Finansial dan Non Finansial yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak di Indonesia” oleh bertujuan untuk menyelidiki apakah faktor finansial dan non finansial mempengaruhi agresivitas pajak. Sampel penelitian 72 *firmyear* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013, metode *purposive sampling*. Sumber data merupakan data sekunder. Analisis data: metode regresi linier. Hasil penelitian: faktor finansial *leverage* & likuiditas, dan faktor non finansial komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Keterbatasan penelitian: terdapat sub sektor yang tidak terwakili. Saran untuk penelitian selanjutnya: menggunakan sampel perusahaan dengan karakteristik berbeda dengan sektor manufaktur.

8. Imam Fadli (2016)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)” bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, dewan komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Sampel 40 perusahaan dari seluruh perusahaan manufaktur, metode *purposive sampling*. Sumber data adalah data sekunder. Analisis data ialah analisis regresi berganda. Hasil penelitian: likuiditas perusahaan, *leverage*, proporsi dewan komisaris independen, dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya: menambah variabel lain dan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama.

9. Jeane Atari (2016)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang terhadap *Tax Aggressive* (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)” bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang terhadap pajak yang agresif. Sampel 14 perusahaan transportasi, metode *purposive sampling*. Sumber data adalah data sekunder. Analisis data adalah model regresi berganda. Hasil penelitian: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang memiliki pengaruh signifikan pada pajak agresif. Saran untuk penelitian selanjutnya: tahun pengamatan dapat diperpanjang, menambah jumlah sampel, dan menggunakan beberapa

pengukuran lain yaitu menggunakan tiga proksi perhitungan yaitu GAAP *effective tax rate* (GETR), *current effective tax rate* (CuETR), dan *book-tax difference* (BTD).

10. Risma Cahyani (2016)

Penelitiannya berjudul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak” bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh manajemen laba dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Sampel 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014, metode *purposive sampling*. Sumber data merupakan data sekunder. Analisis data dengan model regresi berganda. Hasil penelitian: manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya: menambahkan perusahaan yang bergerak di sektor selain sektor manufaktur, menambah variabel lain dan menggunakan proksi selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan.

Tabel 3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	Chyntia Rahmawati	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - CSR - <i>Leverage</i>	- ETR - Metode scoring - Rasio Hutang	CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	Universitas Pakuan, Skripsi, 2018
2.	Imam Fadli	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - Likuiditas - <i>Leverage</i> - Komisaris Independen - Manajemen Laba - Kepemilikan Institusional	- CETR - Rasio lancar - Rasio hutang - Persentase dewan komisaris - <i>Discretionary Accrual</i> - Proporsi kepemilikan saham oleh institusi terhadap jumlah saham	Likuiditas, <i>leverage</i> , dewan komisaris independen, manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap	Universitas Riau, JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016

		Indonesia (2011-2013)		yang beredar	agresivitas pajak.	
3.	Lana Adi Tania	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2016	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - <i>Corporate Social Responsibility</i> - Ukuran Perusahaan -Kepemilikan Manajerial	- ETR - CSR Indeks - Hasil nilai total aktiva - Perbandingan antara jumlah kepemilikan saham oleh manajemen dengan jumlah saham beredar	SIZE dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	Universitas Nusantara PGRI Kediri, Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018, ISSN : 2599-0748
4.	Naomi Malem Rehna Ginting	Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Telekomunikasi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - Manajemen Laba - <i>Corporate Governance</i>	- ETR - <i>Discretionary accruals</i> - Komisaris independen dan komite audit	<i>Corporate governance</i> dengan proksi komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan manajemen laba dan <i>corporate governance</i> dengan proksi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	Universitas Telkom, Bandung, e-Proceeding of Management : Vol.5, No.2 Agustus 2018, ISSN : 2355-9357
5.	Nofia Umi Latifah	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - Komite Audit -Kepemilikan Institusional - Proporsi Dewan	- NPM - Jumlah total anggota komite dalam perusahaan - Jumlah saham institusional dibagi jumlah saham beredar - Jumlah komisaris	Proporsi dewan komisaris dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara komite audit, kepemilikan institusional, dan <i>inventory intensity</i> tidak	Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Skripsi, 2018

		Indonesia Periode Tahun 2014 - 2016)	Komisaris - <i>Capital Intensity</i> - <i>Inventory Intensity</i> Variabel Kontrol: - Ukuran Perusahaan	independen dibagi jumlah seluruh dewan komisaris - Rasio intensitas aset tetap - Rasio <i>inventory Intensity</i> - Besar kecil aset yang dimiliki perusahaan	berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	
6.	Dea Listika Sari	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Mayoritas & <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2014)	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - <i>Corporate social responsibility</i> -Kepemilikan Mayoritas - <i>Corporate Governance</i>	- ETR - Indikator pengungkapan CSR - Variabel Dummy - Variabel Dummy	Secara keseluruhan, diketahui bahwa <i>CSR</i> , kepemilikan mayoritas, dan <i>corporate governance</i> berpengaruh pada agresivitas pajak.	Universitas Riau, JOM Fekon Vol.4 No.1 (Februari) 2017
7.	Shelly Novitasari	Pengaruh Manajemen Laba, <i>Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> yang Terdaftar di Bei Periode Tahun 2010-2014)	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - Manajemen Laba -Kepemilikan Manajerial -Kepemilikan Institusional - Komisaris Independen - Frekuensi Pertemuan Komite Audit - Intensitas Modal	- CETR - <i>Discretionary Accruals</i> - Variabel dummy - Variabel dummy - Jumlah komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris - Jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit dalam satu tahun - Rasio intensitas aset tetap	Manajemen laba, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pajak agresif. Sedangkan kepemilikan manajerial, intensitas rapat komite audit, dan intensitas modal tidak berpengaruh pada pajak agresif.	Universitas Riau, JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017
8.	Ardy dan Ari Budi Kristanto	Faktor Finansial dan Non Finansial yang	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak	- ETR	Faktor finansial leverage & likuiditas, dan faktor non	Universitas Kristen Satya Wacana,

		Mempengaruhi Agresivitas Pajak di Indonesia	Variabel Independen: - <i>Leverage</i> - Likuiditas - <i>Corporate governance</i> -Kepemilikan keluarga	- Rasio Total Kewajiban - Rasio Lancar - Komposisi komisaris independen dan komite audit - Dummy Variabel	finansial komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 16 No. 1 April 2016
9.	Jeane Atari	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, & Kebijakan Hutang terhadap <i>Tax Aggressive</i> (Studi Empiris Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013)	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: -Kepemilikan Manajerial -Kepemilikan Institusional - Kebijakan Hutang	- ETR - <i>Dummy Variable</i> - <i>Dummy Variable</i> - Rasio Hutang	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kebijakan hutang memiliki pengaruh signifikan pada pajak agresif.	Universitas Riau, JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016
10.	Risma Cahyani	Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Dependen: - Agresivitas Pajak Variabel Independen: - Manajemen Laba - <i>Corporate Social Responsibility</i>	- CETR - <i>Discretionary Accruals</i> - Indeks pengungkapan CSR	Manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan CSR Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 2016

2.3. Kerangka Pemikiran

Oleh karena pajak yang bersifat memaksa, tentunya perusahaan mau tidak mau harus rela mengurangi penghasilannya untuk membayar pajak. Tujuan perusahaan dan pemerintah sama-sama ingin memaksimalkan pendapatan. Pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara dari pembayaran pajak, dan perusahaan pun ingin memaksimalkan pendapatan tanpa adanya beban pajak yang besar. Alhasil perusahaan menjadi semakin agresif terhadap pajak dengan melakukan tindakan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Dalam penelitian ini, digunakan

variabel independen yaitu *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility*, dan manajemen laba. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak.

2.3.1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak

2.3.1.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Diantari dan Ulupui (2016) dalam Latifah (2018) menyatakan apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan pihak manajemen. Latifah (2018), dalam penelitiannya membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik agresivitas pajak. Suyanto dan Supramono (2012) dalam Latifah (2018) menyatakan bahwa dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya *tax aggressive*. Secara proaktif, dewan komisaris independen juga dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan perpajakan yang berlaku sehingga meminimalkan adanya *tax evasion*. Sehingga kehadiran komisaris independen dapat mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Novitasari (2017) dan Fadli (2016) bahwa komisaris independen mempengaruhi agresivitas pajak.

Sedangkan dalam penelitian Ardy dan Kristanto (2016) dan Ginting (2018) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.3.1.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang. Ardy dan Kristanto (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak jumlah komite audit dapat mendorong efisiensi beban pajak dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan efisiensi termasuk pajak, sehingga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Dalam penelitian Ginting (2018) juga menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Dalam penelitian Latifah (2018) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedikit atau banyaknya anggota komite audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan.

2.3.1.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Atari (2016) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada perusahaan akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga kepemilikan manajerial bisa diharapkan dapat membuat pihak manajemen untuk mengesampingkan kepentingan pribadinya agar tidak terjadi *tax aggressive*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya *tax aggressive*. Didukung dengan penelitiannya yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive* karena besarnya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan membuat manajerial dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan *tax aggressive* agar mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar.

Dalam penelitian Tania (2018) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan saham oleh pihak perusahaan, salah satunya oleh pihak manajer akan menimbulkan kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak, dengan cara mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan dengan tujuan agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Novitasari (2017) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial disebabkan perusahaan di Indonesia rata-rata kepemilikan manajerialnya sangat kecil yaitu sekitar di bawah 5%.

2.3.2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Octaviana (2014) dalam Listika Sari (2017), menyatakan bahwa akan semakin sulit membedakan antara CSR yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan reputasi perusahaan. Hal ini karena, apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata dunia. Namun jika pembayaran pajak perusahaan hanya dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis maka tujuannya pasti untuk meminimalkan pajak. Sejalan dengan penelitiannya yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga, bentuk kepedulian perusahaan yang dilakukan akan membuat pengungkapan CSR semakin menunjukkan tingkat agresivitas pajak.

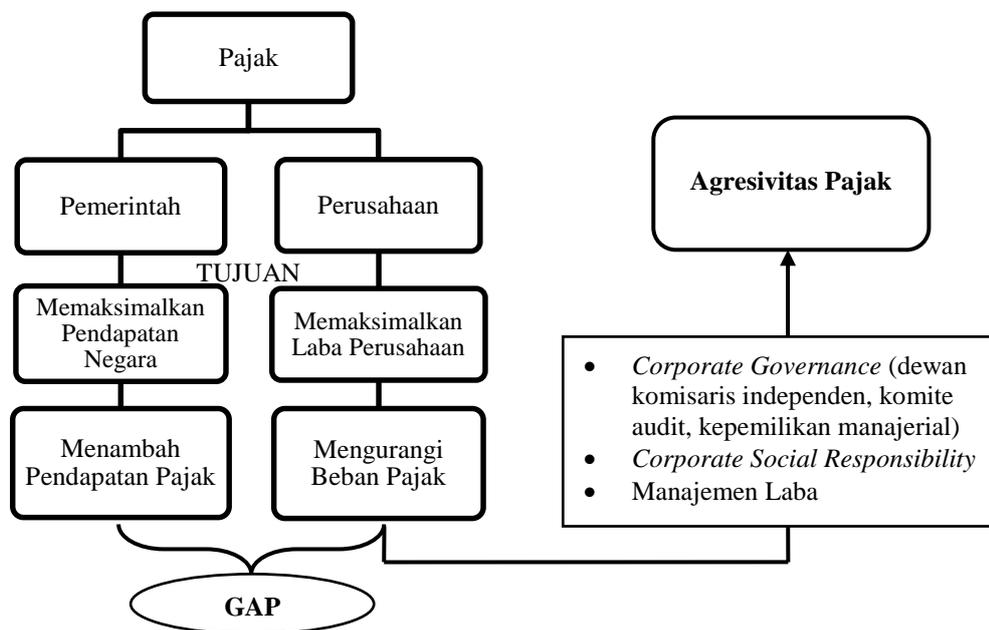
Dalam penelitian Cahyani (2016) menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa apabila nilai pengungkapan CSR besar, maka belum tentu perusahaan akan semakin tidak agresif terhadap pajak. Sedangkan dalam penelitian Rahmawati (2018) dan Tania (2018) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.3.3. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Income taxation merupakan salah satu motivasi dalam manajemen laba. Manajer cenderung memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang menghasilkan laporan laba dan pajak yang relatif rendah. Dalam penelitian Fadli (2016), memberikan bukti bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan koefisien regresi bernilai positif, hal ini dikarenakan semakin baik dan agresif perusahaan dalam melakukan perencanaan terhadap laba untuk mencapai tujuan tertentu, maka akan semakin meningkat agresivitas pajak pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian Novitasari (2017) juga menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut terindikasi berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan.

Berbeda dengan penelitian Cahyani (2016), hasil menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak dan Ginting (2018) bahwa manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat digambarkan konstelasi penelitian seperti berikut ini:



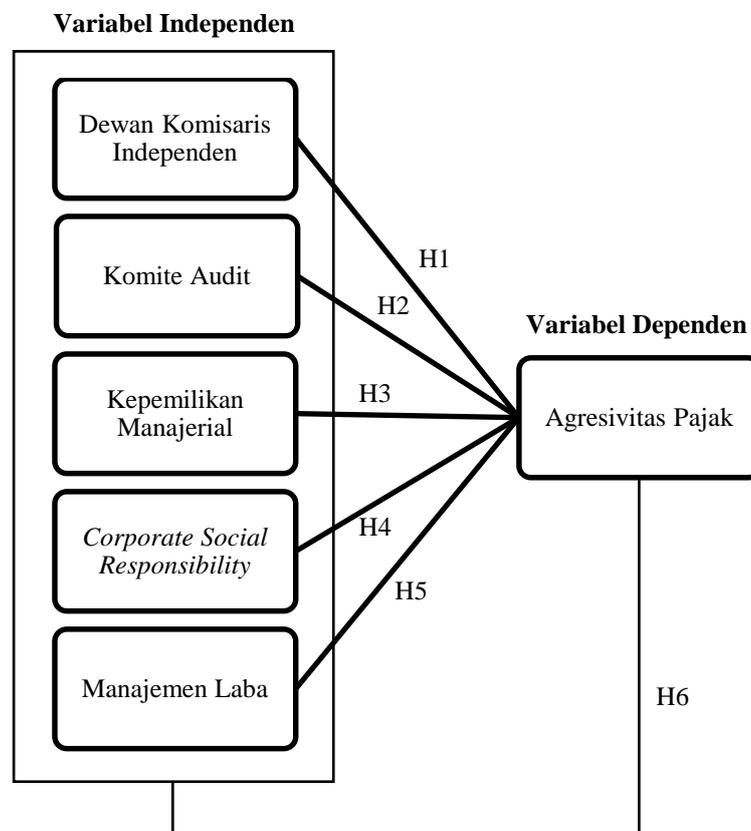
Gambar 2
Konstelasi Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian (hubungan dua variabel atau lebih) yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: *Corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H2: *Corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H3: *Corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H4: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H5: Manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H6: *Corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak



Gambar 3

Corporate Governance, *Corporate Social Responsibility*, dan Kepemilikan Manajerial secara Bersama-sama Berpengaruh pada Agresivitas Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey*. Metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Teknik penelitian yang digunakan adalah statistik kuantitatif.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah *Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba sebagai variabel independen dan Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen. Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, yaitu Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lokasi penelitiannya adalah Bursa Efek Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka. Sumber data penelitian merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu data yang dipublikasikan dalam website resmi perusahaan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data yaitu data yang diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs www.sahamok.com.

3.4. Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas/tidak terikat) yaitu tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba. Penjelasan dari masing-masing variabel independen tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara berbagai partisipan di perusahaan yang mengarahkan kepada kinerja perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Dalam penelitian ini menggunakan tiga

proksi pengukuran yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial.

1) Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Sulistyanto, 2008:141). Dewan komisaris independen diukur dengan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

2) Komite Audit

Komite audit merupakan pihak yang memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit (Sulistyanto, 2008:141). Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan menghitung jumlah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

3) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajerial. Kepemilikan manajerial dinyatakan dalam presentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.

b. *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat. *Corporate social responsibility* diukur dengan menggunakan proksi indeks pengungkapan *corporate social responsibility* yang mengacu pada indikator pengungkapan yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang telah disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum rinci.

Indikator ini terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Ada 78 total item pengungkapan, namun dari 78 item tersebut disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda.

Pengukuran dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, sebaliknya jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan tahunan, serta mencocokkannya dengan *check list*, hasil pengungkapan perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRI_{it} = \frac{\sum XY_{it}}{n_{it}}$$

Keterangan:

$CSRI_{it}$: indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

$\sum XY_{it}$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan

n_{it} : jumlah item untuk perusahaan i

c. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan manajer untuk mengubah informasi akuntansi, sehingga membuat pihak yang menerima informasi tersebut menjadi keliru dalam memahami dan membuat keputusan ekonomi. Manajemen laba diukur dengan *Discretionary Accruals* (DA) menurut model *Modified Jones* (1991) seperti yang digunakan dalam penelitian Cahyani (2016). Laba dengan menggunakan *Modified Jones* membagi total akrual menjadi dua, yaitu komponen *non-discretionary accruals* dan komponen *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* mencerminkan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer yang meliputi empat tahapan, yaitu:

- 1) Mengukur *total accruals* yang dihitung dengan rumus:

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} : total *accruals* perusahaan i pada periode ke t

N_{it} : laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} : aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

- 2) Menghitung nilai *accruals* diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

$$TA_{it}/A_{it-1} = a_1(1/A_{it-1}) + a_2((REV_{it} - REV_{it-1})/A_{it-1}) + (a_3 PPE_{it}/A_{it-1})$$

Keterangan:

TA_{it} : total *accruals* perusahaan i pada periode t

A_{it-1} : total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

REV_{it} : pendapatan perusahaan i tahun t

REV_{it-1} : pendapatan perusahaan i tahun t-1

PPE_{it} : jumlah aktiva tetap (*property, plant and equipment*) perusahaan i pada akhir tahun t

- 3) Menghitung *non-discretionary accruals* dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = a_1(1/A_{it-1}) + a_2((REV_{it} - REV_{it-1}) - [REC_{it} - REC_{it-1}])/A_{it-1} + a_3(PPE_{it}/A_{it-1})$$

Keterangan:

NDA_{it} : *non-discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it} : piutang perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it-1} : piutang perusahaan i pada tahun t-1

4) Menghitung nilai *discretionary accruals* dengan rumus:

$$DA_{it} = \left(TA_{it} / A_{it-1} \right) - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} : *discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

Discretionary Accruals dapat bernilai nol, positif atau negatif. Nilai nol menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income-smoothing*), nilai positif menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba (*income-increasing*), dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola penurunan laba (*income-decreasing*).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat/tidak bebas) yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak ialah tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan yang dilakukan melalui perencanaan pajak baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Dalam penelitian ini, untuk mengukur agresivitas pajak menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah (2014), ETR dapat dihitung dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.

Tabel 4
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Corporate Governance</i>	Dewan Komisaris Independen	$\frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total komisaris}}$	Rasio
	Komite Audit	Σ Komite audit	Rasio
	Kepemilikan Manajerial	$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$	Rasio
<i>Corporate Social Responsibility</i>	Indeks Pengungkapan CSR	$CSRI_{it} = \frac{\sum XY_{it}}{n_{it}}$	Rasio
Manajemen Laba	<i>Discretionary Accruals</i>	$DA_{it} = \left(TA_{it} / A_{it-1} \right) - NDA_{it}$	Rasio
Agresivitas Pajak	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	$\frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Penelitian menggunakan sampel data perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk menentukan sampel meliputi:

1. Perusahaan mempublikasikan *annual report* dan data keuangan yang lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2013-2017
2. Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dan menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian sebelum/setelah pajak
4. Perusahaan tidak memperoleh *income tax benefit* (manfaat pajak penghasilan)
5. Perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan
6. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial selama periode penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dari 129 perusahaan, terpilih 20 perusahaan yang dijadikan sampel seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Daftar Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1.	INTD	Inter Delta Tbk
2.	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
3.	LTLS	Lautan Luas Tbk
4.	UNTR	United Tractor Tbk
5.	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk
6.	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk
7.	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk
8.	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk
9.	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk
10.	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk
11.	PANR	Panorama Sentrawisata Tbk
12.	SHID	Hotel Sahid Jaya International Tbk
13.	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk
14.	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
15.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
16.	SCMA	Surya Citra Media Tbk
17.	MTDL	Metrodata Electronics Tbk
18.	BMTR	Global Mediacom Tbk
19.	SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk
20.	GEMA	Gema Grahasarana Tbk

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka. Penulis mengumpulkan data dengan memperoleh dan mencatat data-data yang berasal dari www.idx.co.id dan website resmi perusahaan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dan mengkaji beberapa literatur baik dari buku, jurnal, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah (Sujarweni, 2014). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program pengolah data yaitu *Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 23*.

3.7.1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2004) dalam Priyatno (2014:31), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis deskriptif (*descriptive*) digunakan untuk penggambaran tentang statistik data seperti min, max, mean, sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain dan untuk mengukur distribusi data dengan skewness dan kurtosis (Priyatno, 2014:31).

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Duwi Priyatno (2014:90), uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian-pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat tidak terpenuhi, hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas, yaitu dengan melihat grafik histogram, melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (Priyatno, 2014:91).

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar (Priyatno: 2014:100).

Ada beberapa metode uji multikolinieritas menurut Duwi Priyatno (2014:100), yaitu:

- a. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2).
- b. Dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor (VIF) pada model regresi.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Macam-macam uji heteroskedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi Spearman's rho, melihat pola titik-titik pada grafik regresi, Uji Park, dan uji Glejser (Priyatno, 2014:109).

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test) atau *Run test*.

Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* (Priyatno, 2014:107), adalah sebagai berikut:

- $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $DU < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- $DU < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson*.

3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh

satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas (*independent*) yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda, jumlah variabel bebas (*independent*) yang digunakan lebih dari satu yang memengaruhi satu variabel tak bebas (*dependent*) (Siregar, 2017:301).

Rumus Regresi Linier Berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana:

Y = Agresivitas Pajak

a = Konstanta

$b_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi

X₁ = Dewan Komisaris Independen

X₂ = Komite Audit

X₃ = Kepemilikan Manajerial

X₄ = *Corporate Social Responsibility*

X₅ = Manajemen Laba

e = error

3.7.4. Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2016:95), ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengukur nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

3.7.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model (variabel-variabel independen) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 mempunyai range antara nol sampai dengan satu, atau ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati satu) maka semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin R^2 mendekati nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen.

3.7.4.2 Uji Statistik t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%. Kriteria uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ berarti variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
2. Jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ berarti variabel independen tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%. Kriteria uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian pada penelitian ini adalah *Corporate Governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba sebagai variabel independen dan Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen. Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, yaitu Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lokasi penelitiannya adalah Bursa Efek Indonesia .

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017. Pengambilan sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dijadikan sampel. Metode pengumpulan data yaitu dengan mendownload data-data yang berasal dari www.idx.co.id dan website resmi perusahaan.

Adapun proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Proses Seleksi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017	129
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> dan data keuangan secara lengkap	(27)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian sebelum/setelah pajak	(49)
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangan dan tidak menyajikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember	(4)
5.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan	(0)
6.	Perusahaan tidak memiliki kepemilikan manajerial	(25)
7.	Perusahaan memperoleh <i>income tax benefit</i>	(4)
	Total perusahaan yang sesuai kriteria (sampel)	20
	Perusahaan yang memiliki data outlier	(7)
	Total perusahaan setelah outlier	13
	Jumlah observasi 13 perusahaan x 5 tahun	65

Sumber: Data diolah penulis dari www.idx.co.id, 2019

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dari 129 perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan, namun setelah dilakukan uji asumsi klasik, terdapat data yang memiliki nilai outlier sebanyak 7 perusahaan yaitu PT Inter Delta Tbk, PT Lautan Luas Tbk, PT Erajaya Swasembada Tbk, PT Island Concepts Indonesia Tbk, PT Panorama Sentrawisata Tbk, PT Hotel Sahid Jaya International Tbk, dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Sehingga, setelah menghilangkan data outlier tersebut, diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan dengan jumlah observasi adalah 65 sampel penelitian.

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam hal perdagangan baik secara besar maupun kecil, menawarkan jasa kepada konsumen, dan menawarkan produk-produk yang dimilikinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari www.sahamok.com, perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang menjadi sampel, antara lain:

Tabel 7

Daftar Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Menjadi Sampel

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1.	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	4 Desember 2007
2.	UNTR	United Tractor Tbk	19 September 1989
3.	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	6 November 2007
4.	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk	12 Desember 2007
5.	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk	30 November 2010
6.	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk	24 Juli 1996
7.	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk	16 April 2002
8.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk	22 Juni 2007
9.	SCMA	Surya Citra Media Tbk	16 Juli 2002
10.	MTDL	Metrodata Electronics Tbk	9 April 1990
11.	BMTR	Global Mediacom Tbk	17 Juli 1995
12.	SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk	26 Juni 2013
13.	GEMA	Gema Grahasarana Tbk	12 Agustus 2002

Berikut ini disajikan gambaran umum perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 yang dijadikan sampel dalam penelitian.

1. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., sebagai bagian dari Grup Jaya, merupakan perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dengan kompetensi inti dalam sektor infrastruktur dan sektor konstruksi bangunan, perdagangan aspal dan bahan bakar gas cair (LPG), pabrikasi beton pracetak dan pekerjaan mekanikal dan

elektrikal serta jasa pemeliharaan. Pada awalnya, Perseroan merupakan Divisi Kontraktor di PT Pembangunan Jaya, yang kemudian menjadi badan hukum tersendiri pada 23 Desember 1982 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2007. Pengalaman perseroan yang kuat dalam memberikan solusi bernilai tambah, memperkuat profilnya di sektor komersil, dengan memberikan jasa konstruksi yang terintegrasi, pelayanan teknis dan pemeliharaan untuk hotel, mal, apartemen, dan bangunan kantor di seluruh Indonesia.

2. PT United Tractor Tbk (UNTR)

PT United Tractors Tbk adalah perusahaan publik dengan fokus usaha pada distribusi alat-alat berat, kontraktor penambangan, pertambangan, dan jasa kontraktor umum. Berdiri pada 1972, perseroan saat ini menjadi distributor alat berat terbesar di Indonesia, khususnya menjadi pemimpin di pasar alat berat melalui produk-produk Komatsu yang perseroan distribusikan (35% pada 2017 berdasarkan riset internal). Perseroan berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri, melalui lima pilar bisnis, yaitu Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan, Industri Konstruksi dan Energi. Perseroan merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan menjangkau berbagai industri dan sektor. Dari proses pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) pada 19 September 1989, hingga kini Astra memiliki 59,5% saham perseroan, dengan sisa saham dimiliki oleh publik.

3. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)

PT Ace Hardware Indonesia Tbk (AHI) didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawan Lama Sejahtera. Gerai pertama Ace Hardware dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang, Banten. AHI mengoperasikan jaringan gerai modern dengan menyediakan produk-produk berkualitas selama lebih dari dua dekade. Sejak tanggal 6 November 2007, AHI menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode bursa 'ACES' dengan menawarkan saham Perseroan sebesar 30% kepada publik melalui mekanisme *Initial Public Offering*. Saat ini, jumlah saham *free float* perseroan adalah 40%. Selain itu, likuiditas perdagangan dan perluasan kepemilikan saham juga ditingkatkan melalui pemecahan saham dengan rasio 1:10 sejak 1 November 2012.

4. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)

PT Catur Sentosa Adiprana didirikan pada bulan Desember 1983, karena begitu pesat perkembangan dalam segmen distribusi dimana kebutuhan akan sebuah manajemen yang moderen semakin tak terelakan. Pada tahun 1997, Budyanto Totong (Direktur Utama) melihat adanya kesempatan lain di segmen ritel moderen, yang memperkenalkan konsep "One Stop Shopping" bahan bangunan di Indonesia dengan brand Mitra 10. Untuk terus bertumbuh dan

mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan kembali memperkuat struktur permodalannya melalui proses “*Initial Public Offering*”. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2007 dengan kode saham CSAP. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan barang hasil produksi.

5. PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)

PT Midi Utama Indonesia Tbk didirikan pada bulan Juni 2007. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perseroan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan toserba/swalayan dan minimarket. Perusahaan berkedudukan di Gedung Alfa Tower, Lantai 12, Kav. 7–9, Jl. Jalur Sutera Barat, Alam Sutera, Tangerang, Banten 15143. Pada awal pendiriannya, PT Midi Utama Indonesia Tbk bernama PT Midimart Utama. Gerai pertamanya menyandang nama Alfamidi terletak di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Pada tanggal 30 November 2010, perseroan melakukan penawaran umum perdana (IPO) dari 15% saham perseroan dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

6. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)

Sebagai salah satu department store yang paling terkemuka di Republik Indonesia, diposisikan untuk melayani pasar menengah bawah, Ramayana telah tumbuh dan berkembang seiring dengan terus meningkatnya daya beli rata-rata masyarakat Indonesia, yang berjumlah puluhan juta rupiah. Pertama kali didirikan sebagai usaha kecil pada tahun 1978, kini Ramayana telah menjadi pemimpin pasar dalam segmen retail menengah-bawah dan bawah. Barang-barang utama yang diperdagangkan oleh perseroan adalah pakaian dan aksesoris untuk pria, wanita, & anak-anak, bersama dengan aksesoris dan barang fashion lainnya, sepatu, mainan, peralatan rumah tangga, alat tulis, dan bahan makanan, melalui Ramayana Supermarket.

7. PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk memulai usahanya yang bergerak di bidang percetakan (*General Printing*) dengan spesialisasi percetakan *Business Form* khususnya spesifikasi dalam mencetak di atas kertas *continuous form* dengan menggunakan mesin *web printing*. Tepat pada tanggal 16 April 2002 perseroan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode JTPE. Berdasarkan persetujuan Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2011 dilakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan rasio 1:5 dan nilai nominal Rp20 setiap saham, sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 1.769.680.000 saham.

8. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)

PT Media Nusantara Citra Tbk, atau MNCN, telah mengoperasikan 4 dari 11 stasiun *Free-to-Air* (FTA) TV dan memiliki bisnis inti dalam memproduksi dan mendistribusikan konten-konten televisi. Perseroan yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 merupakan perusahaan publik yang sahamnya telah tercatat dalam Bursa Efek Jakarta (BEI) sejak tanggal 22 Juni 2007, dengan kode saham 'MNCN'. Maksud dan tujuan perseroan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah untuk terlibat dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi.

9. PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)

Perseroan yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa penyiaran televisi ini didirikan dengan nama PT Cipta Aneka Selaras berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.03 tanggal 29 Januari 1999, dibuat di hadapan Umar Saili, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada tahun 2001, perseroan mengubah namanya menjadi PT Surya Citra Media sebagai penyesuaian atas perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pada tahun 2002, dilakukan pengambilalihan saham PT Surya Citra Televisi (SCTV) oleh Perseroan sebesar 99,99%. Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) dengan kode saham SCMA.

10. PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL)

PT Metrodata Electronics Tbk ("Perseroan") merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi (TiK). Perseroan didirikan pada 17 februari 1983 sebagai salah satu perusahaan dalam kelompok usaha Metrodata yang telah berkiprah di bidang TiK sejak 1975. Sejak didirikan, Perseroan mengalami perubahan nama beberapa kali, dan terakhir pada 28 Maret 1991 namanya diubah menjadi PT Metrodata Electronics Tbk hingga sekarang. Pada tanggal 14 februari 1990 Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (IDX: MTDL).

11. PT Global Mediacom Tbk (BMTR)

PT Global Mediacom Tbk memegang portofolio media terbesar yang menawarkan stasiun televisi FTA, TV Berlangganan, dan konten multimedia, serta portal online, surat kabar, majalah, radio, dan layanan Internet broadband. Perseroan juga memiliki usaha media lainnya yang masih berhubungan dan mendukung fokus utama Perseroan, seperti agensi manajemen artis dan agensi iklan. Didirikan pada tanggal 30 Juni 1981, Perseroan pada awalnya merupakan konglomerasi yang bergerak dalam sektor perdagangan umum. Setelah melakukan beberapa akuisisi dan divestasi, Perseroan mengubah fokus usahanya ke industri media. Pada tahun 2007, Perseroan menegaskan fokus baru ini dengan melakukan rebranding menjadi PT Global Mediacom Tbk. Perseroan adalah perseroan publik

dan sahamnya telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1995, dengan kode saham BMTR.

12. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)

PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk merupakan perusahaan investasi aktif pada tahun 1991. Portofolio investasi Saratoga terus berkembang hingga pada akhir tahun 2013, nilai aset bersih Perseroan mencapai Rp17,8 triliun mencakup berbagai investasi di sektor Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Konsumer melalui 18 perusahaan investee, dengan total ekuitas senilai Rp10,4 triliun. Setelah 15 tahun beroperasi, Saratoga (kode saham: SRTG) berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2013, menjadi perusahaan sejenis pertama yang mencatatkan sahamnya di bursa Indonesia.

13. PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA)

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama “PT Gema Gerhana Sarana” pada 7 Desember 1984. Pada tanggal 16 Juli 1994, nama perseroan berubah menjadi “PT Gema Grahasarana”. Perseroan mengambil langkah strategis melalui Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada 12 Agustus 2002 dengan kode saham “GEMA”; dan nama perseroan berubah menjadi “PT Gema Grahasarana Tbk”. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, ruang lingkup aktivitas usaha Perseroan saat ini meliputi perdagangan umum, manufaktur, industri dan jasa perancangan dan pemborongan di bidang interior dan furnitur.

4.1.2. Data Corporate Governance Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara berbagai partisipan di perusahaan yang mengarahkan kepada kinerja perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Dalam penelitian ini menggunakan tiga proksi pengukuran yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial.

1. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (KNKG, 2006 dalam Andrian, 2018). Dewan komisaris independen diukur dengan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

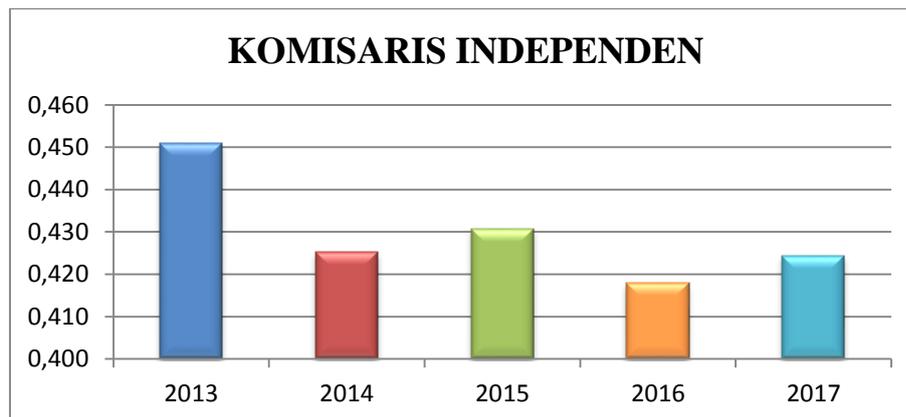
$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total komisaris}}$$

Berikut ini data perhitungan dewan komisaris independen perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017:

Tabel 8
Data perhitungan Dewan Komisaris Independen

KODE	KOMISARIS INDEPENDEN (KI)				
	2013	2014	2015	2016	2017
JKON	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
UNTR	0.429	0.429	0.333	0.333	0.333
ACES	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
CSAP	0.400	0.400	0.400	0.400	0.333
MIDI	0.667	0.500	0.500	0.500	0.500
RALS	0.500	0.500	0.500	0.400	0.400
JTPE	0.667	0.500	0.500	0.500	0.500
MNCN	0.400	0.400	0.400	0.333	0.333
SCMA	0.500	0.500	0.400	0.400	0.400
MTDL	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
BMTR	0.333	0.333	0.600	0.600	0.750
SRTG	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
GEMA	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
MEAN	0.451	0.425	0.431	0.418	0.424
MAX	0.667	0.500	0.600	0.600	0.750
MIN	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333

Sumber: Data diolah penulis, 2019



Gambar 4
Grafik Rata-rata Komisaris Independen

Berdasarkan data perhitungan dan grafik di atas terlihat bahwa rata-rata dewan komisaris independen dari tahun 2013-2017 memiliki nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2013, rata-rata dewan komisaris independen berjumlah 0.451, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0.425, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0.431, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 0.418, dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.424.

Nilai tertinggi dewan komisaris independen pada tahun 2013 yaitu perusahaan dengan kode MIDI dan JTPE sebesar 0.667. Pada tahun 2014, nilai tertinggi dimiliki oleh perusahaan dengan kode ACES, MIDI, RALS, JTPE, dan SCMA yaitu 0.500. Perusahaan dengan kode BMTR memiliki nilai tertinggi di tahun 2015-2016 yaitu sebesar 0.600 dan 0.750 di tahun 2017.

Nilai terendah dewan komisaris independen adalah sebesar 0.333. Pada tahun 2013-2014 dimiliki oleh perusahaan dengan kode MTDL, BMTR, dan GEMA. Pada tahun 2015, dimiliki oleh perusahaan dengan kode UNTR, MTDL, dan GEMA. Pada tahun 2016, dimiliki oleh perusahaan dengan kode UNTR, MNCN, MTDL, dan GEMA. Dan pada tahun 2017, nilai terendah dimiliki oleh perusahaan dengan kode UNTR, CSAP, MNCN, MTDL, dan GEMA.

2. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris. Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan menghitung jumlah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

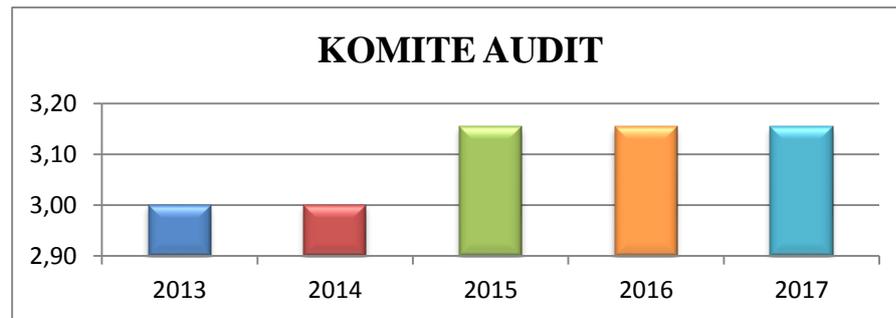
$$KA = \Sigma \text{Komite audit}$$

Berikut ini data perhitungan komite audit perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017:

Tabel 9
Data Perhitungan Komite Audit

KODE	KOMITE AUDIT (KA)				
	2013	2014	2015	2016	2017
JKON	3	3	3	3	3
UNTR	3	3	3	3	3
ACES	3	3	3	3	3
CSAP	3	3	3	3	3
MIDI	3	3	3	3	3
RALS	3	3	3	3	3
JTPE	3	3	3	3	3
MNCN	3	3	4	4	4
SCMA	3	3	3	3	3
MTDL	3	3	3	3	3
BMTR	3	3	4	4	4
SRTG	3	3	3	3	3
GEMA	3	3	3	3	3
MEAN	3	3	3.15	3.15	3.15
MAX	3	3	4	4	4
MIN	3	3	3	3	3

Sumber: Data diolah penulis, 2019



Gambar 5
Grafik Rata-rata Komite Audit

Berdasarkan data perhitungan dan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2013-2014, rata-rata perusahaan memiliki jumlah komite audit 3 orang, sedangkan pada tahun 2015-2017, perusahaan memiliki rata-rata komite audit 3.15 orang.

Nilai terendah komite audit berjumlah 3 orang dan nilai tertinggi komite audit berjumlah 4 orang yang dimiliki oleh perusahaan dengan kode MNCN dan BMTR yaitu pada tahun 2015-2017.

3. Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Novitasari (2017), kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajerial. Kepemilikan manajerial dinyatakan dalam presentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Berikut ini data perhitungan kepemilikan manajerial perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017:

Tabel 10
Data Perhitungan Kepemilikan Manajerial

KODE	KEPEMILIKAN MANAJERIAL (KM)				
	2013	2014	2015	2016	2017
JKON	0.041450	0.041450	0.041450	0.021109	0.032986
UNTR	0.000574	0.000574	0.000006	0.000006	0.000004
ACES	0.000006	0.000006	0.000006	0.000006	0.000006
CSAP	0.053900	0.053900	0.032911	0.040128	0.065590
MIDI	0.006592	0.006592	0.006592	0.006592	0.006592
RALS	0.036600	0.036600	0.036600	0.036600	0.083700
JTPE	0.051080	0.051080	0.051080	0.051080	0.051080
MNCN	0.002008	0.000974	0.000729	0.000846	0.000821
SCMA	0.000792	0.000792	0.000308	0.000308	0.000308
MTDL	0.017672	0.017672	0.017672	0.017672	0.003723
BMTR	0.007013	0.006121	0.006550	0.005615	0.007364

SRTG	0.582979	0.582979	0.291490	0.307181	0.310731
GEMA	0.077572	0.077572	0.077576	0.062079	0.038329
MEAN	0.067557	0.067409	0.043305	0.042248	0.046249
MAX	0.582979	0.582979	0.291490	0.307181	0.310731
MIN	0.000007	0.000007	0.000006	0.000006	0.000004

Sumber: Data diolah penulis, 2019



Gambar 6
Grafik Rata-rata Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan data perhitungan dan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2013, perusahaan memiliki rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0.067557. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0.067409, pada tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 0.043305, pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 0.042248, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0.046249.

Nilai tertinggi kepemilikan manajerial dimiliki oleh perusahaan dengan kode SRTG. Pada tahun 2013-2014 sebesar 0.582979, pada tahun 2015 sebesar 0.291490, pada tahun 2016 sebesar 0.307181, dan pada tahun 2017 sebesar 0.310731.

Nilai terendah kepemilikan manajerial dimiliki oleh perusahaan dengan kode ACES yaitu sebesar 0.000007 pada tahun 2013-2014, sedangkan perusahaan dengan kode UNTR memiliki nilai terendah pada tahun 2015-2016 yaitu sebesar 0.000006 dan pada tahun 2017 sebesar 0.000004.

4.1.3. Data *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (2) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan yang tidak melaksanakan hal ini dapat dikenakan

sanksi. *Corporate social responsibility* diukur dengan menggunakan proksi indeks pengungkapan *corporate social responsibility*.

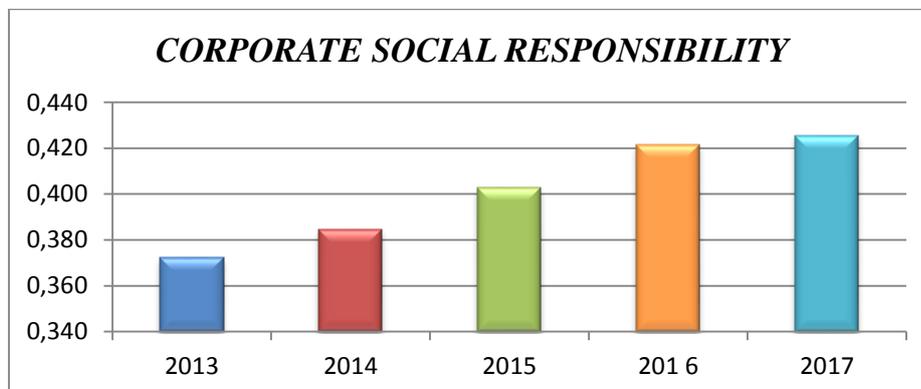
$$CSRI_{it} = \frac{\sum XY_{it}}{n_{it}}$$

Berikut ini data perhitungan *Corporate Social Responsibility* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017:

Tabel 11
Data Perhitungan *Corporate Social Responsibility*

KODE	<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
JKON	0.418	0.448	0.463	0.582	0.582
UNTR	0.567	0.582	0.582	0.612	0.627
ACES	0.269	0.284	0.313	0.328	0.328
CSAP	0.358	0.328	0.373	0.343	0.343
MIDI	0.239	0.313	0.388	0.448	0.448
RALS	0.164	0.164	0.194	0.239	0.239
JTPE	0.422	0.438	0.438	0.422	0.422
MNCN	0.344	0.344	0.344	0.359	0.359
SCMA	0.313	0.328	0.328	0.328	0.328
MTDL	0.516	0.531	0.547	0.578	0.578
BMTR	0.422	0.406	0.422	0.406	0.406
SRTG	0.372	0.385	0.385	0.385	0.385
GEMA	0.436	0.449	0.462	0.449	0.487
MEAN	0.372	0.385	0.403	0.421	0.426
MAX	0.567	0.582	0.582	0.612	0.627
MIN	0.164	0.164	0.194	0.239	0.239

Sumber: Data diolah penulis, 2019



Gambar 7
Grafik Rata-rata *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan data perhitungan dan grafik di atas terlihat bahwa rata-rata *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013-2017, nilai rata-rata CSR masing-masing sebesar 0.367, 0.375, 0.395, 0.415, dan 0.420.

Nilai tertinggi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimiliki oleh perusahaan dengan kode UNTR yaitu sebesar 0.552 pada tahun 2013, sebesar 0.567 di tahun 2014-2015, sebesar 0.597 pada tahun 2016, dan sebesar 0.420 di tahun 2017.

Nilai terendah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimiliki oleh perusahaan dengan kode RALS yaitu sebesar 0.149 pada tahun 2013-2014, sebesar 0.179 pada tahun 2015, dan sebesar 0.224 pada tahun 2016-2017.

4.1.4. Data Manajemen Laba (DA) Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui para *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008:6). Manajemen laba diukur dengan *Discretionary Accruals* (DA) menurut model *Modified Jones*.

$$DA_{it} = \left(TA_{it} / A_{it-1} \right) - NDA_{it}$$

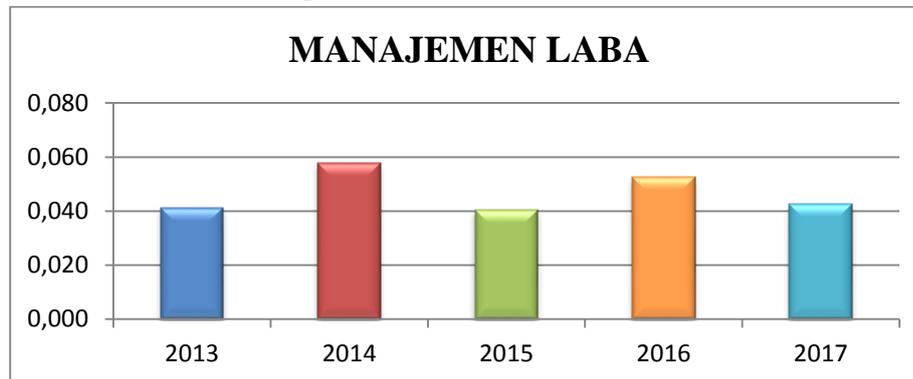
Berikut ini data perhitungan manajemen laba perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017:

Tabel 12
Data Perhitungan Manajemen Laba

KODE	MANAJEMEN LABA (DA)				
	2013	2014	2015	2016	2017
JKON	0.137	0.070	0.003	0.010	0.158
UNTR	-0.036	0.003	-0.093	-0.022	0.002
ACES	0.209	0.080	0.009	0.101	0.059
CSAP	0.092	0.038	0.032	0.116	0.059
MIDI	-0.132	-0.032	-0.084	-0.071	-0.089
RALS	-0.037	-0.065	-0.010	-0.021	-0.041
JTPE	-0.047	0.244	0.210	0.093	0.043
MNCN	0.076	0.138	0.064	0.034	0.031
SCMA	0.040	0.105	0.044	0.070	0.058
MTDL	0.095	-0.012	0.215	-0.125	0.084
BMTR	0.023	0.048	-0.013	-0.066	-0.041
SRTG	0.080	0.065	0.078	0.329	0.048
GEMA	0.039	0.069	0.070	0.234	0.181

MEAN	0.041	0.058	0.040	0.052	0.043
MAX	0.209	0.244	0.215	0.329	0.181
MIN	-0.132	-0.065	-0.093	-0.125	-0.089

Sumber: Data diolah penulis, 2019



Gambar 8
Grafik Rata-rata Manajemen Laba

Berdasarkan data perhitungan dan grafik di atas terlihat bahwa rata-rata manajemen laba yang diprosikan dengan *Discretionary Accruals* (DA) memiliki nilai fluktuatif. Pada tahun 2013, rata-rata DA sebesar 0.041, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0.058, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0.040, pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 0.052, dan di tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 0.043.

Nilai tertinggi *Discretionary Accruals* (DA) pada tahun 2013 dimiliki oleh perusahaan dengan kode ACES yaitu sebesar 0.209, pada tahun 2014 dimiliki oleh perusahaan dengan kode JTPE sebesar 0.244, pada tahun 2015 dimiliki oleh perusahaan dengan kode MTDL, pada tahun 2016 dimiliki oleh perusahaan dengan kode SRTG sebesar 0.329, dan pada tahun 2017 dimiliki oleh perusahaan dengan kode GEMA sebesar 0.181.

Nilai terendah DA pada tahun 2013 dan 2017 dimiliki oleh perusahaan dengan kode MIDI yaitu masing-masing sebesar -0.132 dan -0.089, pada tahun 2014 dimiliki oleh perusahaan dengan kode RALS sebesar -0.065, pada tahun 2015 dimiliki oleh perusahaan dengan kode UNTR sebesar -0.093, dan pada tahun 2016 dimiliki oleh perusahaan dengan kode MTDL sebesar -0.125.

4.1.5. Data Agresivitas Pajak (ETR) Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Frank (2009) dalam Listika Sari (2017) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Dalam penelitian ini, untuk mengukur agresivitas pajak menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dapat dihitung dari total beban pajak penghasilan yang di dalamnya

mengandung beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dibagi dengan laba sebelum pajak.

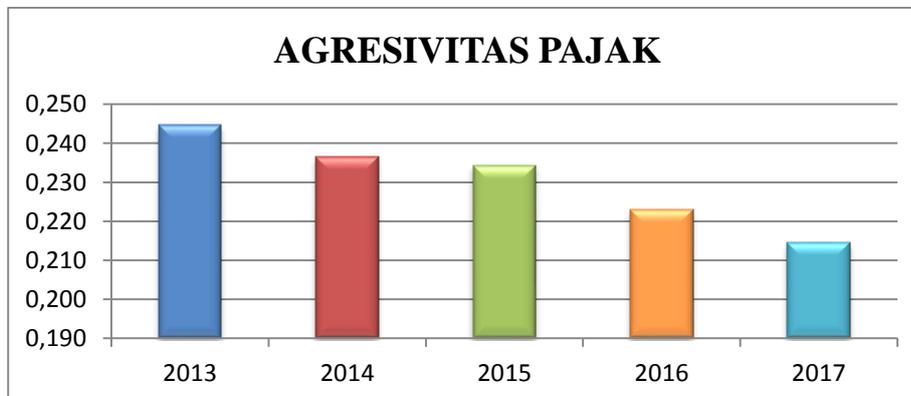
$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Berikut ini data perhitungan agresivitas pajak perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017:

Tabel 13
Data Perhitungan Agresivitas Pajak

KODE	AGRESIVITAS PAJAK (ETR)				
	2013	2014	2015	2016	2017
JKON	0.299	0.310	0.187	0.175	0.127
UNTR	0.272	0.269	0.334	0.242	0.271
ACES	0.193	0.195	0.206	0.182	0.187
CSAP	0.221	0.187	0.180	0.260	0.227
MIDI	0.133	0.208	0.224	0.206	0.158
RALS	0.147	0.085	0.078	0.122	0.129
JTPE	0.254	0.200	0.268	0.193	0.259
MNCN	0.244	0.260	0.240	0.311	0.351
SCMA	0.254	0.245	0.252	0.252	0.261
MTDL	0.293	0.238	0.216	0.248	0.201
BMTR	0.319	0.327	0.539	0.443	0.480
SRTG	0.108	0.111	0.134	0.134	0.025
GEMA	0.445	0.439	0.187	0.131	0.116
MEAN	0.245	0.237	0.234	0.223	0.215
MAX	0.445	0.439	0.539	0.443	0.480
MIN	0.108	0.085	0.078	0.122	0.025

Sumber: Data diolah penulis, 2019



Gambar 9
Grafik Rata-rata Agresivitas Pajak

Berdasarkan data perhitungan dan grafik di atas terlihat bahwa rata-rata nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, nilai rata-rata ETR sebesar 0.245, dan terjadi penurunan pada tahun 2014-2017 yaitu masing-masing sebesar 0.237, 0.234, 0.223, dan 0.215.

Nilai tertinggi *Effective Tax Rate* (ETR) pada tahun 2013-2014 dimiliki oleh perusahaan dengan kode GEMA yaitu masing-masing sebesar 0.445 dan 0.439, sedangkan pada tahun 2015-2017 dimiliki oleh perusahaan dengan kode BMTR yaitu masing-masing sebesar 0.539, 0.443, dan 0.480.

Nilai terendah *Effective Tax Rate* (ETR) dimiliki oleh perusahaan dengan kode SRTG yaitu pada tahun 2013 dan 2017 yang masing-masing sebesar 0.108 dan 0.025. Pada tahun 2014-2016, nilai terendah dimiliki oleh perusahaan dengan kode RALS yaitu masing-masing sebesar 0.085, 0.078, dan 0.122.

4.2. Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program pengolah data yaitu *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Versi 23.

4.2.1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif (*descriptive*) bertujuan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti, minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), standar deviasi, varian, dan lain-lain.

Tabel 14
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	65	.02	.54	.2306	.09716
KI	65	.33	.75	.4299	.09257
KA	65	3	4	3.09	.292
KM	65	.00	.58	.0534	.11460
CSR	65	.15	.61	.3943	.10704
DA	65	-.13	.33	.0469	.09166
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data diolah penulis, 2019

Dari tabel 13 di atas dapat diketahui untuk variabel ETR, jumlah data 65, nilai minimum sebesar 0.02, nilai maksimum sebesar 0.54, rata-rata sebesar 0.2306, dan standar deviasisebesar 0.09716. Variabel KI (Komisaris Independen) memiliki nilai minimum sebesar 0.33, nilai maksimum sebesar 0.75, rata-rata 0.4299, dan standar deviasi sebesar 0.09257. Selanjutnya, variabel KA (Komite

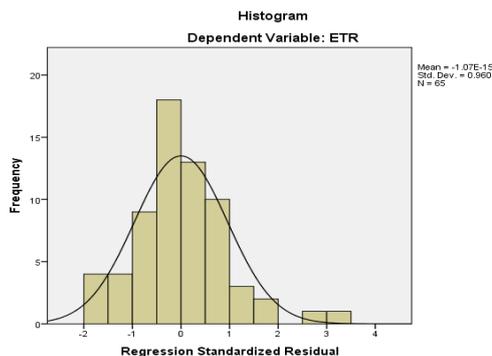
Audit) memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 4, rata-rata 3.09, dan standar deviasi sebesar 0.292. Variabel KM (Kepemilikan Manajerial) memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum sebesar 0.58, rata-rata 0.534, dan standar deviasi sebesar 0.11460. Variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 0.15, nilai maksimum sebesar 0.61, rata-rata 0.3943, dan standar deviasi sebesar 0.10704. Sedangkan variabel DA memiliki nilai minimum sebesar -0.13, nilai maksimum sebesar 0.33, rata-rata 0.469, dan standar deviasi sebesar 0.09166.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

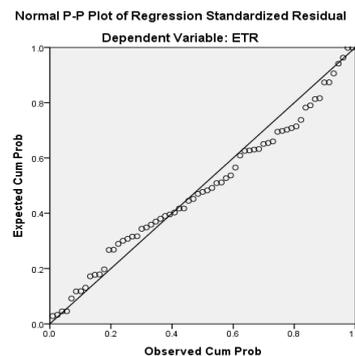
Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian-pengujian dapat dipercaya.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan yaitu dengan melihat grafik histogram, grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual, dan untuk memperkuat pengujian dilakukan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 10
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik
Histogram



Gambar 11
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik
Normal P-Plot

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Pada grafik histogram di atas tampak bahwa grafik berbentuk lonceng (*bell-shaped*), artinya bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Dan pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual, tampak bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

Tabel 15
Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07026253
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.074
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Dari tabel 14 di atas dapat diketahui nilai signifikansi (Asym. Sig. 2-tailed) melebihi 0.05 ($0.200 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Dalam penelitian ini, metode uji multikolinieritas yang digunakan yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi.

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.432	.119		-3.639	.001		
	KI	.070	.115	.067	.607	.546	.732	1.365
	KA	.171	.033	.513	5.220	.000	.919	1.089
	KM	-.223	.083	-.263	-2.683	.009	.922	1.085
	CSR	.299	.095	.329	3.160	.002	.816	1.225
	DA	-.023	.106	-.022	-.221	.826	.882	1.134

a. Dependent Variable: ETR

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Dari tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel independen KI, KA, KM, CSR dan DA lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen KI, KA, KM, CSR dan DA tidak memiliki masalah multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji koefisien korelasi Spearman's rho.

Tabel 17
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Correlations

			KI	KA	KM	CSR	DA	Unstandardized Residual
Spearman's rho	KI	Correlation Coefficient	1.000	.114	-.126	-.422**	-.227	.021
		Sig. (2-tailed)	.	.367	.316	.000	.069	.868
		N	65	65	65	65	65	65
	KA	Correlation Coefficient	.114	1.000	-.204	-.119	-.198	.008
		Sig. (2-tailed)	.367	.	.103	.345	.113	.946
		N	65	65	65	65	65	65
	KM	Correlation Coefficient	-.126	-.204	1.000	-.030	.222	-.011
		Sig. (2-tailed)	.316	.103	.	.814	.076	.929
		N	65	65	65	65	65	65
	CSR	Correlation Coefficient	-.422**	-.119	-.030	1.000	.038	-.021
		Sig. (2-tailed)	.000	.345	.814	.	.763	.871
		N	65	65	65	65	65	65
	DA	Correlation Coefficient	-.227	-.198	.222	.038	1.000	.098
		Sig. (2-tailed)	.069	.113	.076	.763	.	.438
		N	65	65	65	65	65	65
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	.021	.008	-.011	-.021	.098	1.000
		Sig. (2-tailed)	.868	.946	.929	.871	.438	.
		N	65	65	65	65	65	65

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Dari tabel 16 di atas, dapat diketahui korelasi antara KI, KA, KM, CSR dan DA dengan *Unstandardized Residual* yang menghasilkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0.868, 0.946, 0.929, 0.871, dan 0.438. Karena nilai signifikansi korelasi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini, metode uji autokorelasi yang digunakan yaitu analisis *Run test*. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Menurut Ghozali (2016), dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Run test* adalah:

- Jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* kurang dari 0.05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih dari 0.05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 18
Hasil Uji Run test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00417
Cases < Test Value	32
Cases >= Test Value	33
Total Cases	65
Number of Runs	26
Z	-1.874
Asymp. Sig. (2-tailed)	.061

a. Median

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Dari tabel 17 di atas dapat diketahui nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* melebihi 0.05 ($0.061 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa residual bersifat acak sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi antar nilai residual. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak terselesaikan dengan Durbin Watson dapat teratasi melalui uji *Run test* sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Tabel 19
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.432	.119		-3.639	.001
	KI	.070	.115	.067	.607	.546
	KA	.171	.033	.513	5.220	.000
	KM	-.223	.083	-.263	-2.683	.009
	CSR	.299	.095	.329	3.160	.002
	DA	-.023	.106	-.022	-.221	.826

a. Dependent Variable: ETR

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Dengan melihat tabel 18 di atas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$ETR = -0.432 + 0.070 \text{ KI} + 0.171 \text{ KA} + -0.223 \text{ KM} + 0.299 \text{ CSR} + -0.023 \text{ DA} + e$$

Keterangan:

Y = Agresivitas Pajak

a = Konstanta

b_{1,2,3,4,5} = Koefisien Regresi

X₁ = Dewan Komisaris Independen

X₂ = Komite Audit

X₃ = Kepemilikan Manajerial

X₄ = *Corporate Social Responsibility*

X₅ = Manajemen Laba

e = error

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut:

- Konstanta
Konstanta sebesar -0.432; artinya jika KI, KA, KM, CSR, dan DA nilainya 0, maka ETR nilainya sebesar -0.432.
- Koefisien regresi variabel Komisaris Independen
Koefisien regresi variabel KI sebesar 0.070; artinya jika KI mengalami kenaikan 1 satuan, maka ETR akan mengalami peningkatan sebesar 0.070 satuan.
- Koefisien regresi variabel Komite Audit
Koefisien regresi variabel KA sebesar 0.171; artinya jika KA mengalami kenaikan 1 satuan, maka ETR akan mengalami peningkatan sebesar 0.171 satuan.
- Koefisien regresi variabel Kepemilikan Manajerial

Koefisien regresi variabel KM sebesar -0.223; artinya jika KM mengalami kenaikan 1 satuan, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.223 satuan.

- Koefisien regresi variabel *Corporate Social Responsibility*
Koefisien regresi variabel CSR sebesar 0.299; artinya jika CSR mengalami kenaikan 1 satuan, maka ETR akan mengalami peningkatan sebesar 0.299 satuan.
- Koefisien regresi variabel Manajemen Laba
Koefisien regresi variabel DA sebesar -0.023; artinya jika DA mengalami kenaikan 1 satuan, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.023 satuan.

4.2.4. Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengukur nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara statistik, pengujian hipotesis dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik t (parsial), dan nilai statistik F (simultan).

4.2.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model (variabel-variabel independen) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar R^2 (mendekati satu) maka semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin R^2 mendekati nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen.

Tabel 20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.691 ^a	.477	.433	.07318	1.304

a. Predictors: (Constant), DA, CSR, KA, KM, KI

b. Dependent Variable: ETR

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Dari tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa:

- R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Angka R yang didapat yaitu 0.691 artinya korelasi antara variabel KI, KA, KM, CSR, dan DA terhadap ETR sebesar 0.691 atau 69.1%.
- *R Square* (R^2) menunjukkan nilai koefisien determinasi, artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, nilai R^2 sebesar 0.477 artinya presentase sumbangan pengaruh variabel KI, KA, KM,

CSR dan DA terhadap ETR sebesar 47.7% sedangkan sisanya sebesar 52.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

- *Adjusted R Square (Adjusted R²)* adalah R Square yang telah disesuaikan, yang juga menunjukkan presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai sebesar 0.433 (43.3%). Artinya, kontribusi pengaruh semua variabel independen (KI, KA, KM, CSR, dan DA) terhadap variabel dependen ETR adalah sebesar 43.3%. Sedangkan sisanya sebesar 56.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
- *Standard Error of the Estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi, nilai sebesar 0.07318 artinya kesalahan yang dapat memprediksi *Effective Tax Rate*.

4.2.4.2 Uji Statistik t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (*Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Manajemen Laba*) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (*Agresivitas Pajak*). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Tabel 21
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.432	.119		-3.639	.001
KI	.070	.115	.067	.607	.546
KA	.171	.033	.513	5.220	.000
KM	-.223	.083	-.263	-2.683	.009
CSR	.299	.095	.329	3.160	.002
DA	-.023	.106	-.022	-.221	.826

a. Dependent Variable: ETR

(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik t (pada taraf signifikansi $\alpha = 5\% : 2 = 0.025$ (uji 2 sisi) dan derajat bebas $db = n - k - 1$, atau $db = 65 - 5 - 1 = 59$). Diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.001.

Dari hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Variabel KI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ETR. Hal ini karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.607 < 2.001$).
- Variabel KA berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ETR. Hal ini karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.220 > 2.001$).
- Variabel KM berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ETR. Hal ini karena $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2.683 < -2.001$).
- Variabel CSR berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ETR. Hal ini karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.160 > 2.001$).

- Variabel DA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ETR. Hal ini karena $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-0.221 > -2.001$).

4.2.4.3 Uji Statistik F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (*Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Agresivitas Pajak). Dalam penelitian ini, uji F dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Tabel 22
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.288	5	.058	10.762	.000 ^b
	Residual	.316	59	.005		
	Total	.604	64			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), DA, CSR, KA, KM, KI
(Sumber: Data diolah penulis, 2019)

Dari tabel 21 di atas, nilai F_{hitung} adalah sebesar 10.762. Sedangkan nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik F (pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas $db_1 = k$ dan $db_2 = n-k-1$), atau $db_1 = 5$ dan $db_2 = 65-5-1 = 59$. Diperoleh nilai $F_{tabel} = 2.371$. Karena nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($10.762 > 2.371$) maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (KI, KA, KM, CSR, dan DA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (ETR).

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Dari hasil uji t terlihat bahwa variabel *corporate governance* yang menggunakan indikator dewan komisaris independen memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.607 dan t_{tabel} sebesar 2.001, maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($0.607 < 2.001$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.546 lebih dari taraf nyata 0.05 atau ($0.546 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance* yang diprosikan dengan dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR) dan H1 ditolak.

4.3.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Dari hasil uji t terlihat bahwa variabel *corporate governance* yang menggunakan indikator komite audit memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5.220 dan t_{tabel} sebesar 2.001, maka ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($5.220 > 2.001$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 kurang dari taraf nyata 0.05 atau ($0.000 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR) dan H2 diterima.

4.3.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Dari hasil uji t terlihat bahwa variabel *corporate governance* yang menggunakan indikator kepemilikan manajerial memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.683 dan t_{tabel} sebesar 2.001, maka ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$) ($-2.683 < -2.001$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.009 kurang dari taraf nyata 0.05 atau ($0.009 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR) dan H3 diterima.

4.3.4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Dari hasil uji t terlihat bahwa variabel *corporate social responsibility* yang menggunakan indikator pengungkapan CSR memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.160 dan t_{tabel} sebesar 2.001, maka ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($3.160 > 2.001$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.002 kurang dari taraf nyata 0.05 atau ($0.002 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate social responsibility* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR) dan H4 diterima.

4.3.5. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Dari hasil uji t terlihat bahwa variabel manajemen laba yang menggunakan indikator *discretionary accruals* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.221 dan t_{tabel} sebesar 2.001, maka ($-t_{hitung} > -t_{tabel}$) ($-0.221 > -2.001$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.826 lebih dari taraf nyata 0.05 atau ($0.826 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR) dan H5 ditolak.

4.3.6. Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017

Dari hasil uji F terlihat bahwa variabel *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba memiliki nilai F_{hitung} sebesar 10.762 dan F_{tabel} sebesar 2.371, maka ($F_{hitung} > F_{tabel}$) ($10.762 > 2.371$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 kurang dari taraf nyata 0.05 atau ($0.000 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR) dan H_6 diterima.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan menggunakan SPSS versi 23, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

4.4.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak berdampak pada perilaku agresif terhadap pajak.

Pada peraturan Bursa Efek Indonesia dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen yang proporsinya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Data perhitungan dewan komisaris independen pada tabel 7 menunjukkan bahwa presentase komisaris independen perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rata-rata sudah berada di atas 30%. Artinya, proporsi tersebut sudah sesuai dengan peraturan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Sulistiyanto, 2008:141). Dari uji statistik yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh menandakan bahwa komisaris independen belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan cukup baik karena masih adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen di sejumlah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI (lihat tabel 12).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardy dan Kristanto (2016) dan Ginting (2018) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fadli (2016), Novitasari (2017), dan Latifah (2018) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen mempengaruhi agresivitas pajak.

4.4.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Pohan (2008) dalam Ardy dan Kristanto (2016) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Data perhitungan komite audit pada tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah komite audit pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rata-rata beranggotakan tiga hingga empat orang. Artinya jumlah tersebut adalah jumlah yang cukup ideal yang sudah dimiliki perusahaan.

Komite audit memiliki tugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang. Semakin banyak jumlah komite audit dapat mendorong efisiensi beban pajak dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan efisiensi termasuk pajak, sehingga dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Ardy dan Kristanto, 2016).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ardy dan Kristanto (2016) dan Ginting (2018) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.4.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menandakan bahwa besarnya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan membuat manajerial dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan agresivitas pajak agar mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar. Hal ini dibuktikan dari data perhitungan kepemilikan manajerial pada tabel 9, terlihat bahwa kepemilikan manajerial terbesar dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, namun perusahaan tersebut memiliki nilai ETR yang sangat rendah (lihat tabel 12).

Kepemilikan saham oleh manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan manajer dan pemegang saham lainnya sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham lainnya, memastikan kontrak berjalan dengan lancar, dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang mana pihak manajerial sebagai pemegang saham juga (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Novitasari, 2017).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Namun hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Atari (2016) dan Tania (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.4.4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini berarti apabila indeks pengungkapan CSR besar, maka perusahaan akan semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata dunia. Hasil pengujian dilakukan berdasarkan perhitungan indeks pengungkapan CSR karena perusahaan tidak mencantumkan jumlah biaya CSR yang dikurangkan dari penghasilan bruto di dalam laporan keuangan.

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dijelaskan bahwa biaya CSR dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m menjelaskan bahwa sumbangan dan/atau biaya dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010. Dengan adanya peraturan tersebut, tentunya membawa dampak positif bagi perusahaan yang bertujuan memperoleh laba yang maksimal, karena perusahaan tidak lagi berusaha mengurangi penghasilan kena pajaknya dengan cara-cara ilegal. Sehingga perusahaan dapat menjalankan dua kewajibannya sekaligus yakni melaksanakan tanggung jawab sosial dan membayar pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2016) dan Listika Sari (2017) yang menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi,

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmawati (2018) dan Tania (2018) yang membuktikan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.4.5. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *Income taxation* merupakan salah satu motivasi dalam manajemen laba. Manajer cenderung memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang menghasilkan laporan laba dan pajak yang relatif rendah. Dengan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* (pola penurunan laba), perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Namun dari uji statistik yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh berarti perusahaan tidak selalu melakukan agresivitas pajak melalui tindakan manajemen laba. Karena dilihat dari data perhitungan agresivitas pajak pada tabel 12, perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki nilai ETR rendah, seperti PT Ace Hardware Indonesia Tbk dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk melakukan manajemen laba dengan pola perataan laba (DA bernilai nol) dan pada data perhitungan manajemen laba dalam tabel 11, dari 6 perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan *income decreasing* (DA bernilai negatif), ada 3 perusahaan (UNTR, JTPE, BMTR) yang justru memiliki nilai ETR di atas 25%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) dan Novitasari (2017) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Akan tetapi, penelitian mendukung penelitian yang dilakukan Cahyani (2016) dan Ginting (2018) yang membuktikan bahwa manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

4.4.6. Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, pengungkapan CSR serta tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Seperti yang juga terlihat dalam tabel koefisien

determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* memiliki kontribusi nilai sebesar 43.3%. Artinya, kontribusi pengaruh semua variabel independen (*corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan manajemen laba) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak) adalah sebesar 43.3%. Sedangkan sisanya sebesar 56.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah penulis melakukan analisis data, pembahasan, dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak berdampak pada perilaku agresif terhadap pajak.
2. *Corporate Governance* yang diproksikan dengan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak jumlah komite audit dapat mengurangi terjadinya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan serta mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.
3. *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Besarnya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan membuat manajer memanfaatkan wewenangnya untuk berperilaku agresif terhadap pajak agar keuntungan atau laba yang diterima lebih besar.
4. *Corporate Social Responsibility* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Indeks pengungkapan CSR yang besar dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, agar perusahaan mendapat reputasi yang baik di mata dunia. Hasil pengujian dilakukan berdasarkan perhitungan indeks pengungkapan CSR karena perusahaan tidak mencantumkan jumlah biaya CSR yang dikurangkan dari penghasilan bruto di dalam laporan keuangan.
5. Manajemen Laba secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan tidak selalu melakukan agresivitas pajak melalui tindakan manajemen laba dengan *income decreasing*, karena rata-rata perusahaan melakukan manajemen laba dengan *income smothing*.
6. *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Saran Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lain di masa mendatang.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu Penelitian ini hanya meneliti perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Terdapat sub sektor yang tidak terwakili sehingga hasilnya kurang mencerminkan keadaan perilaku agresivitas pajak pada keseluruhan perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada *corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan manajemen laba. Dalam penelitian ini, hanya menggunakan tiga indikator untuk mengukur variabel *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel *corporate social responsibility* hanya melihat pada indikator kegiatan CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan, bukan dilihat dari jumlah biaya CSR yang digunakan sebagai perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga hasilnya kurang mencerminkan sisi agresivitas pajak perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu mengurangi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu Dengan meneliti sektor lain selain perusahaan perdagangan, jasa dan investasi. Menggunakan periode pengamatan dalam jangka waktu yang lebih lama dan terbaru. Menggunakan variabel independen lain untuk meneliti pengaruh agresivitas pajak. Menambah indikator lain dalam mengukur variabel *corporate governance*. Menggunakan indikator selain pengungkapan CSR untuk mengukur variabel *corporate social responsibility*.

2. Saran Praktik

Hasil penelitian ini dapat dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan secara praktik terkait “Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak” antara lain:

- a. Bagi perusahaan, diharapkan agar perusahaan sektor perdagangan jasa, dan investasi menerapkan *good corporate governance*, bukan hanya pada struktur organisasinya tapi juga dalam implementasi fungsi pengawasannya, diharapkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR bukan untuk mengurangi beban pajak dan juga diharapkan agar perusahaan senantiasa bersikap jujur dengan tidak berusaha mengubah informasi-informasi yang ada di dalam laporan keuangan sehingga selain dapat mendapat citra positif dari masyarakat juga dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam mengatasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dan dapat lebih bersikap tegas mengenai penerapan peraturan perpajakan di Indonesia.
- c. Bagi investor, diharapkan agar lebih memperhatikan kondisi perusahaan yang sebenarnya sebelum melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean, D. (2018). *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Financial Leverage terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ardy dan Kristanto, A. (2016). Faktor Finansial dan Non Finansial yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, [online] Vol. 16 No. 1, halaman 53-68.
- Ardyansah, D. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Atari, J. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang terhadap *Tax Aggressive*. *JOM Fekon*, [online] Vol.3 No.1, halaman 1137-1149.
- Cahyani, R. (2016). *Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *JOM Fekon*, [Online] Vol.3 No.1, halaman 1205-1219.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi ke Delapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, N. (2018). Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak. *e-Proceeding of Management*, [online] Vol.5 No.2, halaman 2286-2293.
- Kusuma, H. (2017). Sudah 9 Tahun Setoran Pajak RI Tak Pernah Capai Target. *Detik.com*. Tersedia di: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3728111/sudah-9-tahun-setoran-pajak-ri-tak-pernah-capai-target> (Diakses 29 September 2018)
- Latifah, N. (2018). *Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *JOM Fekon*, [online] Vol. 4 No.1, halaman 1901-1914.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Pohan, C. (2018). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Putera, A. (2018). Penerimaan Pajak 2018 Diprediksi hanya Capai 92 Persen dari Target. *Kompas.com*. Tersedia di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/18/093000226/penerimaan-pajak-2018-diprediksi-hanya-capai-92-persen-dari-target> (Diakses 28september 2018)
- Putri, A. dan Gunawan. (2017). Pengaruh *Size*, *Profitability*, dan *Liquidity* terhadap *Efective Tax Rates* (ETR) Bank Devisa Periode 2010-2014. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, [online] Vol.14 No.1, halaman 18-28.
- Raharjo, S. (2015). *CSR: Relasi Dinamis antara Perusahaan dengan Masyarakat Lokal*. Edisi Kedua. Bandung: Unpad Press.
- Rahmawati, C. (2018). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sari, D. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Mayoritas dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak. *JOM Fekon*, [online] Vol.4 No.1, halaman 1813-1827.
- Sembiring, E. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *SNA VIII Solo*, [online] halaman 379-395.
- Sembiring, L. (2018). Target Penerimaan Pajak 2018: Ambisius dan Sulit Tercapai. *Okezone.com*. Tersedia di: <https://economy.okezone.com/read/2018/01/08/20/1841704/target-penerimaan-pajak-2018-ambisius-dan-sulit-tercapai> (Diakses 28 September2018)
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

- Sulistiyanto, S. (2008). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks.
- Tania, L. (2018). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2016. *Simki-Economic*, [online] Vol. 02 No. 01, halaman 1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Untung, B. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset
- Wisanggeni, I. dan Suharli, M. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Yoehana, M. (2013). *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sumber website:

www.idx.co.id (Diakses 20 Desember 2018)

www.pajak.go.id (Diakses 29 September 2018)

www.sahamok.com (Diakses 10 Desember 2018)

www.kompas.com (Diakses Januari 2019)

www.merdeka.com (Diakses Februari 2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fitriana
Alamat : Jl. Raya Cikaret No. 3 RT01/RW02, Kel.
Harapan Jaya, Kec. Cibinong, Kab. Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 29 Maret 1995
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Bojong Gede 02
• SMP : SMP Al-Mizan
• SMA : SMK Walisongo 2 Depok
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Mei 2019
Peneliti,

(Nurul Fitriana)

LAMPIRAN

Lampiran1 Data Perhitungan Dewan Komisaris Independen

No.	Tahun	Nama dan Kode Perusahaan	Jumlah Komisaris Independen	Jumlah Total Komisaris	Komisaris Independen (KI)
1.	2013	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)	2	5	0,4000
	2014		2	5	0,4000
	2015		2	5	0,4000
	2016		2	5	0,4000
	2017		2	5	0,4000
2.	2013	United Tractor Tbk (UNTR)	3	7	0,4286
	2014		3	7	0,4286
	2015		2	6	0,3333
	2016		2	6	0,3333
	2017		2	6	0,3333
3.	2013	Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)	2	4	0,5000
	2014		2	4	0,5000
	2015		2	4	0,5000
	2016		2	4	0,5000
	2017		2	4	0,5000
4.	2013	Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)	2	5	0,4000
	2014		2	5	0,4000
	2015		2	5	0,4000
	2016		2	5	0,4000
	2017		2	6	0,3333
5.	2013	Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)	4	6	0,6667
	2014		3	6	0,5000
	2015		3	6	0,5000
	2016		3	6	0,5000
	2017		3	6	0,5000
6.	2013	Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)	2	4	0,5000
	2014		2	4	0,5000
	2015		2	4	0,5000
	2016		2	5	0,4000
	2017		2	5	0,4000
7.	2013	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)	2	3	0,6667
	2014		1	2	0,5000
	2015		1	2	0,5000
	2016		1	2	0,5000
	2017		1	2	0,5000
8.	2013	Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)	2	5	0,4000
	2014		2	5	0,4000
	2015		2	5	0,4000
	2016		1	3	0,3333
	2017		1	3	0,3333

9.	2013	Surya Citra Media Tbk (SCMA)	2	4	0,5000
	2014		2	4	0,5000
	2015		2	5	0,4000
	2016		2	5	0,4000
	2017		2	5	0,4000
10.	2013	Metrodata Electronics Tbk (MTDL)	1	3	0,3333
	2014		1	3	0,3333
	2015		1	3	0,3333
	2016		1	3	0,3333
	2017		1	3	0,3333
11.	2013	Global Mediacom Tbk (BMTR)	2	6	0,3333
	2014		2	6	0,3333
	2015		3	5	0,6000
	2016		3	5	0,6000
	2017		3	4	0,7500
12.	2013	Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)	2	5	0,4000
	2014		2	5	0,4000
	2015		2	5	0,4000
	2016		2	5	0,4000
	2017		2	5	0,4000
13.	2013	Gema Grahasarana Tbk (GEMA)	1	3	0,3333
	2014		1	3	0,3333
	2015		1	3	0,3333
	2016		1	3	0,3333
	2017		1	3	0,3333

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan (2019)

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total komisaris}}$$

Lampiran 2 Data Perhitungan Komite Audit

No.	Nama dan Kode Perusahaan	Komite Audit (KA)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)	3	3	3	3	3
2.	United Tractor Tbk (UNTR)	3	3	3	3	3
3.	Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)	3	3	3	3	3
4.	Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)	3	3	3	3	3
5.	Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)	3	3	3	3	3
6.	Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)	3	3	3	3	3
7.	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)	3	3	3	3	3
8.	Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)	3	3	4	4	4
9.	Surya Citra Media Tbk (SCMA)	3	3	3	3	3
10.	Metrodata Electronics Tbk (MTDL)	3	3	3	3	3
11.	Global Mediacom Tbk (BMTR)	3	3	4	4	4
12.	Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)	3	3	3	3	3
13.	Saratoga Investama Sedaya Tbk (GEMA)	3	3	3	3	3

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan (2019)

$$KA = \Sigma \text{ Komite audit}$$

Lampiran 3 Data Perhitungan Kepemilikan Manajerial

No.	Tahun	Nama dan Kode Perusahaan	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki Manajemen	Jumlah Lembar Saham Beredar	Kepemilikan Manajerial (KM)
1.	2013	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)	675.980.280	16.308.519.860	0,041450
	2014		675.980.280	16.308.519.860	0,041450
	2015		675.980.280	16.308.519.860	0,041450
	2016		344.259.150	16.308.519.860	0,021109
	2017		537.949.550	16.308.519.860	0,032986
2.	2013	United Tractor Tbk (UNTR)	2.140.605	3.730.135.136	0,000574
	2014		2.140.605	3.730.135.136	0,000574
	2015		21.515	3.730.135.136	0,000006
	2016		21.515	3.730.135.136	0,000006
	2017		14.193	3.730.135.136	0,000004
3.	2013	Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)	100.000	17.150.000.000	0,000006
	2014		100.000	17.150.000.000	0,000006
	2015		100.000	17.150.000.000	0,000006
	2016		100.000	17.150.000.000	0,000006
	2017		100.000	17.150.000.000	0,000006
4.	2013	Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)	156.042.537	2.895.037.800	0,053900
	2014		156.042.537	2.895.037.800	0,053900
	2015		95.279.000	2.895.037.800	0,032911
	2016		162.639.200	4.053.052.920	0,040128
	2017		265.839.200	4.053.052.920	0,065590
5.	2013	Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)	19.000.000	2.882.353.000	0,006592
	2014		19.000.000	2.882.353.000	0,006592
	2015		19.000.000	2.882.353.000	0,006592
	2016		19.000.000	2.882.353.000	0,006592
	2017		19.000.000	2.882.353.000	0,006592
6.	2013	Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)	259.713.600	7.096.000.000	0,036600
	2014		259.713.600	7.096.000.000	0,036600
	2015		259.713.600	7.096.000.000	0,036600
	2016		259.713.600	7.096.000.000	0,036600
	2017		593.935.200	7.096.000.000	0,083700
7.	2013	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)	87.500.000	1.713.012.500	0,051080
	2014		87.500.000	1.713.012.500	0,051080
	2015		87.500.000	1.713.012.500	0,051080
	2016		87.500.000	1.713.012.500	0,051080
	2017		87.500.000	1.713.012.500	0,051080
8.	2013	Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)	28.311.000	14.099.463.000	0,002008
	2014		13.907.800	14.276.088.500	0,000974
	2015		10.403.300	14.276.088.500	0,000729
	2016		12.074.300	14.276.103.500	0,000846
	2017		11.717.500	14.276.103.500	0,000821

9.	2013	Surya Citra Media Tbk (SCMA)	11.575.000	14.621.601.234	0,000792
	2014		11.575.000	14.621.601.234	0,000792
	2015		4.500.000	14.621.601.234	0,000308
	2016		4.500.000	14.621.601.234	0,000308
	2017		4.500.000	14.621.601.234	0,000308
10.	2013	Metrodata Electronics Tbk (MTDL)	39.692.077	2.246.000.000	0,017672
	2014		39.692.077	2.246.000.000	0,017672
	2015		40.826.136	2.310.169.758	0,017672
	2016		41.992.597	2.376.172.964	0,017672
	2017		9.140.868	2.455.376.917	0,003723
11.	2013	Global Mediacom Tbk (BMTR)	98.550.440	14.052.702.050	0,007013
	2014		86.911.640	14.198.613.922	0,006121
	2015		93.007.540	14.198.613.922	0,006550
	2016		79.728.440	14.198.621.422	0,005615
	2017		104.562.540	14.198.621.422	0,007364
12.	2013	Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)	1.581.602.000	2.712.967.000	0,582979
	2014		1.581.602.000	2.712.967.000	0,582979
	2015		790.802.500	2.712.967.000	0,291490
	2016		833.371.371	2.712.967.000	0,307181
	2017		843.003.771	2.712.967.000	0,310731
13.	2013	Gema Grahasarana Tbk (GEMA)	24.823.000	320.000.000	0,077572
	2014		24.823.000	320.000.000	0,077572
	2015		24.824.200	320.000.000	0,077576
	2016		19.865.200	320.000.000	0,062079
	2017		12.265.200	320.000.000	0,038329

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan (2019)

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Lampiran 4 Pengungkapan CSR Sektor Perdagangan (67 item yang diharapkan diungkapkan)

KATEGORI		Whole Sale and Retail Trade																													
		JKON					UNTR					ACES					CSAP					MIDI					RALS				
LINGKUNGAN		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan;	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
4	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Perlindungan lingkungan hidup	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ENERGI																															
1	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energy	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA																															
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KATEGORI		Whole Sale and Retail Trade																																		
		JKON					UNTR					ACES					CSAP					MIDI					RALS									
		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17					
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN TENTANG TENAGA KERJA																																				
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KATEGORI		Whole Sale and Retail Trade																													
		JKON					UNTR					ACES					CSAP					MIDI					RALS				
		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
2	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Membantu riset medis	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Membiayai program beasiswa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Mensponsori kampanye nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Mendukung pengembangan industri local	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
UMUM																															
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total item yang diungkapkan		28	30	31	39	39	38	39	39	41	42	18	19	21	22	22	24	22	25	23	23	16	21	26	30	30	11	11	13	16	16

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan (2019)

Lampiran 5 Pengungkapan CSR Sektor Jasa (64 item yang diharapkan diungkapkan)

KATEGORI		Communication																								
		JTPE					MNCN					SCMA					MTDL					BMTR				
LINGKUNGAN		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi;	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan;	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Perlindungan lingkungan hidup	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ENERGI																										
1	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
3	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA																										
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
8	Mengungkapkan pelayanan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KATEGORI		Communication																									
		JTPE					MNCN					SCMA					MTDL					BMTR					
		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	
LAIN-LAIN TENTANG TENAGA KERJA																											
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
10	Mengungkapkan fasilitas aktivitas rekreasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Pengungkapkan persentase gaji untuk pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Mengungkapkan disposisi staf - di mana staf ditempatkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Mengungkapkan jumlah staf masa kerja dan kelompok usia mereka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KATEGORI		Communication																								
		JTPE					MNCN					SCMA					MTDL					BMTR				
		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
19	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
20	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
21	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Peningkatan kondisi kerja secara umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRODUK																										
1	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Membuat produk lebih aman untuk konsumen	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
5	Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KETERLIBATAN MASYARAKAT																										

KATEGORI		Communication																								
		JTPE					MNCN					SCMA					MTDL					BMTR				
		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Membantu riset medis	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
6	Membiyai program beasiswa	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
8	Mensponsori kampanye nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Mendukung pengembangan industri local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
UMUM																										
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total item yang diungkapkan		27	28	28	27	27	22	22	22	23	23	20	21	21	21	21	33	34	35	37	37	27	26	27	26	26

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan (2019)

KATEGORI		Holding and Other Investments & Others									
		SRTG					GEMA				
		13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
9	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
KETERLIBATAN MASYARAKAT											
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
4	Membantu riset medis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
6	Membiayai program beasiswa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
8	Mensponsori kampanye nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Mendukung pengembangan industri local	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UMUM											
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total item yang diungkapkan		29	30	30	30	30	34	35	36	35	38

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan (2019)

Lampiran 7 Data Perhitungan *Corporate Social Responsibility*

No.	Tahun	Nama dan Kode Perusahaan	Item yang Diungkapkan	Item yang Diharapkan	CSRI
1.	2013	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)	28	67	0,4179
	2014		30	67	0,4478
	2015		31	67	0,4627
	2016		39	67	0,5821
	2017		39	67	0,5821
2.	2013	United Tractor Tbk (UNTR)	38	67	0,5672
	2014		39	67	0,5821
	2015		39	67	0,5821
	2016		41	67	0,6119
	2017		42	67	0,6269
3.	2013	Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)	18	67	0,2687
	2014		19	67	0,2836
	2015		21	67	0,3134
	2016		22	67	0,3284
	2017		22	67	0,3284
4.	2013	Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)	24	67	0,3582
	2014		22	67	0,3284
	2015		25	67	0,3731
	2016		23	67	0,3433
	2017		23	67	0,3433
5.	2013	Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)	16	67	0,2388
	2014		21	67	0,3134
	2015		26	67	0,3881
	2016		30	67	0,4478
	2017		30	67	0,4478
6.	2013	Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)	11	67	0,1642
	2014		11	67	0,1642
	2015		13	67	0,1940
	2016		16	67	0,2388
	2017		16	67	0,2388
7.	2013	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)	27	64	0,4219
	2014		28	64	0,4375
	2015		28	64	0,4375
	2016		27	64	0,4219
	2017		27	64	0,4219
8.	2013	Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)	22	64	0,3438
	2014		22	64	0,3438
	2015		22	64	0,3438
	2016		23	64	0,3594
	2017		23	64	0,3594
	2013	Surya Citra Media Tbk	20	64	0,3125
	2014		21	64	0,3281

9.	2015	(SCMA)	21	64	0,3281
	2016		21	64	0,3281
	2017		21	64	0,3281
10.	2013	Metrodata Electronics Tbk (MTDL)	33	64	0,5156
	2014		34	64	0,5313
	2015		35	64	0,5469
	2016		37	64	0,5781
	2017		37	64	0,5781
11.	2013	Global Mediacom Tbk (BMTR)	27	64	0,4219
	2014		26	64	0,4063
	2015		27	64	0,4219
	2016		26	64	0,4063
	2017		26	64	0,4063
12.	2013	Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)	29	78	0,3718
	2014		30	78	0,3846
	2015		30	78	0,3846
	2016		30	78	0,3846
	2017		30	78	0,3846
13.	2013	Gema Grahasarana Tbk (GEMA)	34	78	0,4359
	2014		35	78	0,4487
	2015		36	78	0,4615
	2016		35	78	0,4487
	2017		38	78	0,4872

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan (2019)

$$CSRI_{it} = \frac{\sum XY_{it}}{n_{it}}$$

Lampiran 8 Data Keuangan

(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	N _{it} (Rp)	CFO _{it} (Rp)	TA _{it} (Rp)	A _{it-1} (Rp)	ΔREV (Rp)	PPE _{it} (Rp)	ΔREC (Rp)
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)							
2013	210.967.010.853	-65.760.424.581	276.727.435.434	2.557.731.220.187	613.727.156.517	399.848.076.437	108.472.789.808
2014	220.489.606.735	107.208.988.668	113.280.618.067	3.417.012.222.326	93.403.817.817	630.022.484.980	41.965.664.332
2015	236.634.983.529	360.651.565.461	-124.016.581.932	3.843.621.385.143	-61.178.506.681	673.014.634.774	-13.267.181.227
2016	331.660.186.639	434.407.630.700	-102.747.444.061	3.810.273.494.244	-4.960.436.910	702.440.920.303	-67.857.922.648
2017	309.948.018.000	-170.875.127.000	480.823.145.000	4.007.387.283.000	-155.437.400.000	732.412.188.000	96.475.072.000
United Tractor Tbk (UNTR)							
2013	4.798.778.000.000	12.219.782.000.000	-7.421.004.000.000	50.300.633.000.000	-4.941.530.000.000	27.057.361.000.000	2.147.230.000.000
2014	4.839.970.000.000	9.364.120.000.000	-4.524.150.000.000	57.362.244.000.000	2.129.383.000.000	23.217.092.000.000	1.297.652.000.000
2015	2.792.439.000.000	12.039.161.000.000	-9.246.722.000.000	60.306.777.000.000	-3.794.289.000.000	17.869.357.000.000	-1.632.878.000.000
2016	5.104.477.000.000	10.005.397.000.000	-4.900.920.000.000	61.715.399.000.000	-3.808.241.000.000	17.064.318.000.000	-438.198.000.000
2017	7.673.322.000.000	11.951.265.000.000	-4.277.943.000.000	63.991.229.000.000	19.019.966.000.000	22.746.966.000.000	5.513.769.000.000
Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)							
2013	503.004.238.918	181.339.787.145	321.664.451.773	1.916.914.650.213	672.155.353.893	445.597.536.347	-5.966.951.011
2014	548.892.765.278	435.162.018.647	113.730.746.631	2.478.918.584.338	646.027.592.852	463.020.871.447	-5.196.665.781
2015	584.873.463.989	648.831.005.468	-63.957.541.479	2.958.360.604.225	201.051.965.208	457.127.128.671	-3.635.699.559
2016	706.150.082.276	491.972.036.030	214.178.046.246	3.267.549.674.003	193.376.958.800	588.764.731.189	11.996.330.834
2017	780.686.814.661	690.355.938.041	90.330.876.620	3.731.101.667.891	1.002.673.332.040	705.376.671.769	61.694.347.385
Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)							
2013	75.880.191.000	-24.678.785.000	100.558.976.000	2.512.217.343.000	1.389.452.160.000	734.041.671.000	248.029.000.000
2014	114.689.405.000	118.696.829.000	-4.007.424.000	3.107.895.429.000	676.766.106.000	641.768.554.000	137.221.963.000
2015	43.021.915.000	92.580.497.000	-49.558.582.000	3.308.566.503.000	119.909.722.000	778.838.532.000	-128.157.182.000
2016	74.636.924.000	-165.915.595.000	240.552.519.000	3.522.572.851.000	647.055.552.000	871.363.683.000	195.647.817.000
2017	89.022.191.000	59.811.075.000	29.211.116.000	4.240.820.320.000	1.577.255.873.000	1.201.198.151.000	279.991.115.000

Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)							
2013	67.326.000.000	404.979.000.000	-337.653.000.000	1.732.407.000.000	1.109.789.000.000	623.414.000.000	1.681.000.000
2014	138.624.000.000	347.941.000.000	-209.317.000.000	2.108.897.000.000	1.065.008.000.000	779.386.000.000	30.255.000.000
2015	140.511.000.000	552.062.000.000	-411.551.000.000	2.575.859.000.000	1.228.894.000.000	1.054.122.000.000	94.549.000.000
2016	196.043.000.000	696.506.000.000	-500.463.000.000	3.232.642.000.000	1.321.215.000.000	1.428.451.000.000	75.458.000.000
2017	102.812.000.000	792.739.000.000	-689.927.000.000	4.261.283.000.000	1.274.473.000.000	1.625.214.000.000	38.445.000.000
Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)							
2013	390.535.000.000	831.284.000.000	-440.749.000.000	4.073.365.000.000	301.109.000.000	1.445.497.000.000	204.000.000
2014	355.075.000.000	922.656.000.000	-567.581.000.000	4.378.556.000.000	-139.470.000.000	1.375.402.000.000	271.000.000
2015	336.054.000.000	658.169.000.000	-322.115.000.000	4.565.923.000.000	-328.344.000.000	1.333.227.000.000	1.062.000.000
2016	408.479.000.000	757.048.000.000	-348.569.000.000	4.574.904.000.000	324.033.000.000	1.279.282.000.000	8.373.000.000
2017	406.580.000.000	851.579.000.000	-444.999.000.000	4.647.009.000.000	-234.309.000.000	1.235.256.000.000	-1.979.000.000
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)							
2013	40.744.251.183	101.995.860.948	-61.251.609.765	446.703.439.536	177.839.109.254	216.917.794.691	-66.863.687.750
2014	53.864.739.017	-40.519.207.903	94.383.946.920	575.115.523.377	237.086.663.714	240.301.883.509	50.571.095.024
2015	65.315.606.173	-9.651.439.031	74.967.045.204	661.610.674.748	150.474.605.978	325.281.664.089	1.583.175.382
2016	79.580.165.369	90.037.896.032	-10.457.730.663	886.846.976.750	131.196.931.409	462.474.609.333	47.808.527.842
2017	81.951.350.420	128.033.765.711	-46.082.415.291	1.052.131.760.706	117.753.460.805	459.867.266.199	17.835.499.641
Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)							
2013	1.809.842.000.000	1.440.007.000.000	369.835.000.000	8.960.942.000.000	257.087.000.000	1.542.677.000.000	276.258.000.000
2014	1.883.432.000.000	1.098.167.000.000	785.265.000.000	9.615.280.000.000	143.631.000.000	2.659.203.000.000	282.043.000.000
2015	1.276.968.000.000	1.249.167.000.000	27.801.000.000	13.610.122.000.000	-221.043.000.000	4.145.497.000.000	26.012.000.000
2016	1.482.955.000.000	1.965.553.000.000	-482.598.000.000	14.474.557.000.000	285.341.000.000	4.824.369.000.000	-96.365.000.000
2017	1.567.546.000.000	2.197.773.000.000	-630.227.000.000	14.239.867.000.000	322.410.000.000	5.306.989.000.000	-42.976.000.000
Surya Citra Media Tbk (SCMA)							
2013	1.285.897.062.000	1.271.006.241.000	14.890.821.000	3.837.486.256.000	417.465.777.000	724.969.868.000	-7.628.268.000
2014	1.448.274.225.000	1.178.602.451.000	269.671.774.000	4.010.166.376.000	360.953.770.000	761.977.973.000	274.310.064.000

2015	1.521.585.603.000	1.506.974.464.000	14.611.139.000	4.749.409.795.000	162.752.362.000	962.114.344.000	110.495.367.000
2016	1.511.144.612.000	1.384.727.657.000	126.416.955.000	4.565.963.576.000	286.156.119.000	966.766.368.000	104.036.648.000
2017	1.317.748.064.000	1.250.519.493.000	67.228.571.000	4.820.611.941.000	-70.287.193.000	1.029.335.550.000	46.158.043.000
Metrodata Electronics Tbk (MTDL)							
2013	170.230.738.921	3.289.114.818	166.941.624.103	1.662.380.706.074	2.152.306.225.350	82.793.730.796	494.404.271.616
2014	268.992.821.253	298.682.767.091	-29.689.945.838	2.296.991.727.662	1.119.266.333.086	93.597.759.792	38.469.192.053
2015	326.634.000.000	-257.148.000.000	583.782.000.000	2.734.196.000.000	1.515.501.000.000	104.526.000.000	420.458.000.000
2016	322.877.000.000	793.282.000.000	-470.405.000.000	3.496.665.000.000	88.082.000.000	170.453.000.000	-53.026.000.000
2017	374.241.000.000	78.901.000.000	295.340.000.000	3.876.021.000.000	768.988.000.000	203.781.000.000	163.941.000.000
Global Mediacom Tbk (BMTR)							
2013	1.029.646.000.000	1.559.337.000.000	-529.691.000.000	19.995.526.000.000	1.094.558.000.000	4.920.824.000.000	244.611.000.000
2014	1.290.008.000.000	1.545.216.000.000	-255.208.000.000	21.069.471.000.000	637.175.000.000	6.312.978.000.000	210.970.000.000
2015	283.439.000.000	2.238.999.000.000	-1.955.560.000.000	25.364.325.000.000	-84.318.000.000	7.959.140.000.000	105.728.000.000
2016	786.540.000.000	4.290.388.000.000	-3.503.848.000.000	26.613.973.000.000	-121.678.000.000	8.567.051.000.000	-243.597.000.000
2017	1.054.125.000.000	4.372.376.000.000	-3.318.251.000.000	24.624.431.000.000	369.809.000.000	11.401.113.000.000	135.772.000.000
Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)							
2013	349.088.000.000	-448.214.000.000	797.302.000.000	12.911.435.000.000	1.300.659.000.000	1.251.534.000.000	320.258.000.000
2014	1.064.810.000.000	233.305.000.000	831.505.000.000	16.209.885.000.000	2.465.115.000.000	1.263.980.000.000	122.909.000.000
2015	1.451.612.000.000	512.026.000.000	939.586.000.000	15.840.549.000.000	-1.841.597.000.000	1.304.067.000.000	-316.064.000.000
2016	5.703.425.000.000	292.736.000.000	5.410.689.000.000	16.701.440.000.000	-4.281.393.000.000	90.913.000.000	-194.241.000.000
2017	3.108.177.000.000	1.922.507.000.000	1.185.670.000.000	25.144.272.000.000	-885.000.000	127.764.000.000	242.683.000.000
Gema Grahasarana Tbk (GEMA)							
2013	18.542.905.324	16.071.176.645	2.471.728.679	428.881.106.063	59.416.371.824	74.894.110.422	-864.401.562
2014	18.059.546.155	7.522.403.005	10.537.143.150	377.603.940.826	-26.001.619.255	74.983.592.923	-15.071.821.393
2015	24.922.066.594	8.412.296.213	16.509.770.381	419.733.981.674	205.909.182.809	76.191.343.195	38.974.257.092
2016	30.726.622.050	-19.705.390.136	50.432.012.186	447.899.389.368	105.343.066.890	274.427.888.882	19.721.205.371
2017	23.905.950.470	-37.601.380.213	61.507.330.683	681.245.836.220	-58.187.445.672	300.288.974.915	-3.088.335.076

Lampiran 9 Data Perhitungan Manajemen Laba (*Non-Discretionary Accruals*)

Tahun	1/Ait-1	ΔREV- ΔREC/Ait-1	PPEit/Ait-1	Perkalian Koefisien			NDAit
				a1 = -0,152	a2 = 0,016	a3 = -0,203	
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)							
2013	0,00000000000004	0,1975	0,1563	-0,00000000000001	0,0031606408850	-0,0317348276770	-0,0286
2014	0,00000000000003	0,0151	0,1844	0,00000000000000	0,0002408567492	-0,0374287699691	-0,0372
2015	0,00000000000003	-0,0125	0,1751	0,00000000000000	-0,0001994424347	-0,0355451167452	-0,0357
2016	0,00000000000003	0,0165	0,1844	0,00000000000000	0,0002641174638	-0,0374239557966	-0,0372
2017	0,0000000002495	-0,0629	0,1828	-0,0000000000379	-0,0010057923698	-0,0371013989076	-0,0381
United Tractor Tbk (UNTR)							
2013	0,0000000198805	-0,1409	0,5379	-0,0000000030218	-0,0022548455802	-0,1091963252828	-0,1115
2014	0,0000000174331	0,0145	0,4047	-0,0000000026498	0,0002319939924	-0,0821632723434	-0,0819
2015	0,0000000165819	-0,0358	0,2963	-0,0000000025204	-0,0005734442748	-0,0601504449657	-0,0607
2016	0,0000000162034	-0,0546	0,2765	-0,0000000024629	-0,0008736990909	-0,0561295334735	-0,0570
2017	0,0000000156271	0,2111	0,3555	-0,0000000023753	0,0033770120589	-0,0721604221416	-0,0688
Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)							
2013	0,00000000000005	0,3538	0,2325	-0,00000000000001	0,0056601147460	-0,0471884858663	-0,0415
2014	0,00000000000004	0,2627	0,1868	-0,00000000000001	0,0042032796898	-0,0379170326519	-0,0337
2015	0,00000000000003	0,0692	0,1545	-0,00000000000001	0,0011070329397	-0,0313676456439	-0,0303
2016	0,00000000000003	0,0555	0,1802	0,00000000000000	0,0008881548368	-0,0365776353401	-0,0357
2017	0,00000000000003	0,2522	0,1891	0,00000000000000	0,0040351791762	-0,0383777975286	-0,0343
Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)							
2013	0,0000000003981	0,4543	0,2922	-0,0000000000605	0,0072695822322	-0,0593143183364	-0,0520
2014	0,0000000003218	0,1736	0,2065	-0,0000000000489	0,0027776694825	-0,0419187258511	-0,0391
2015	0,0000000003022	0,0750	0,2354	-0,0000000000459	0,0011996344823	-0,0477863213125	-0,0466
2016	0,0000000002839	0,1281	0,2474	-0,0000000000432	0,0020503546883	-0,0502152361728	-0,0482
2017	0,0000000002358	0,3059	0,2832	-0,0000000000358	0,0048943917831	-0,0574990700509	-0,0526
Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)							
2013	0,0000005772316	0,6396	0,3599	-0,0000000877392	0,0102341586013	-0,0730504102096	-0,0628
2014	0,0000004741815	0,4907	0,3696	-0,0000000720756	0,0078505721237	-0,0750228000704	-0,0672
2015	0,0000003882200	0,4404	0,4092	-0,0000000590094	0,0070460067884	-0,0830739438766	-0,0760
2016	0,0000003093445	0,3854	0,4419	-0,0000000470204	0,0061658890777	-0,0897023403767	-0,0835
2017	0,0000002346711	0,2901	0,3814	-0,0000000356700	0,0046409609500	-0,0774223260929	-0,0728
Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)							
2013	0,0000002454973	0,0739	0,3549	-0,0000000373156	0,0011819417116	-0,0720377110816	-0,0709
2014	0,0000002283858	-0,0319	0,3141	-0,0000000347146	-0,0005106377536	-0,0637668231262	-0,0643
2015	0,0000002190138	-0,0721	0,2920	-0,0000000332901	-0,0011543111875	-0,0592749989433	-0,0604
2016	0,0000002185838	0,0690	0,2796	-0,0000000332247	0,0011039707063	-0,0567649607511	-0,0557
2017	0,0000002151922	-0,0500	0,2658	-0,0000000327092	-0,0007999295891	-0,0539609387458	-0,0548
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)							
2013	0,00000000000022	0,5478	0,4856	-0,00000000000003	0,0087647517470	-0,0985761658070	-0,0898
2014	0,00000000000017	0,3243	0,4178	-0,00000000000003	0,0051889559188	-0,0848199715874	-0,0796

2015	0,0000000000015	0,2250	0,4917	-0,0000000000002	0,0036007020147	-0,0998051880514	-0,0962
2016	0,0000000000011	0,0940	0,5215	-0,0000000000002	0,0015044472068	-0,1058608172051	-0,1044
2017	0,0000000000010	0,0950	0,4371	-0,0000000000001	0,0015194744977	-0,0887275325438	-0,0872
Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)							
2013	0,0000001115954	-0,0021	0,1722	-0,0000000169625	-0,0000342303298	-0,0349476016026	-0,0350
2014	0,0000001040011	-0,0144	0,2766	-0,0000000158082	-0,0002303200739	-0,0561417045577	-0,0564
2015	0,0000000734747	-0,0182	0,3046	-0,0000000111682	-0,0002904367793	-0,0618316199517	-0,0621
2016	0,0000000690867	0,0264	0,3333	-0,0000000105012	0,0004219331894	-0,0676598881057	-0,0672
2017	0,0000000702254	0,0257	0,3727	-0,0000000106743	0,0004105499019	-0,0756551144052	-0,0752
Surya Citra Media Tbk (SCMA)							
2013	0,0000000002606	0,1108	0,1889	-0,0000000000396	0,0017723854279	-0,0383503349293	-0,0366
2014	0,0000000002494	0,0216	0,1900	-0,0000000000379	0,0003456962046	-0,0385723468843	-0,0382
2015	0,0000000002106	0,0110	0,2026	-0,0000000000320	0,0001760454364	-0,0411228384709	-0,0409
2016	0,0000000002190	0,0399	0,2117	-0,0000000000333	0,0006381810734	-0,0429818524474	-0,0423
2017	0,0000000002074	-0,0242	0,2135	-0,0000000000315	-0,0003864911341	-0,0433461807769	-0,0437
Metrodata Electronics Tbk (MTDL)							
2013	0,0000000000006	0,9973	0,0498	-0,0000000000001	0,0159568931249	-0,0101102757570	0,0058
2014	0,0000000000004	0,4705	0,0407	-0,0000000000001	0,0075284355831	-0,0082718387746	-0,0007
2015	0,0000003657382	0,4005	0,0382	-0,0000000555922	0,0064079853822	-0,0077605182657	-0,0014
2016	0,0000002859868	0,0404	0,0487	-0,0000000434700	0,0006456803840	-0,0098957031915	-0,0093
2017	0,0000002579965	0,1561	0,0526	-0,0000000392155	0,0024976005032	-0,0106726828879	-0,0082
Global Mediacom Tbk (BMTR)							
2013	0,0000000500112	0,0425	0,2461	-0,0000000076017	0,0006801097405	-0,0499575391015	-0,0493
2014	0,0000000474620	0,0202	0,2996	-0,0000000072142	0,0003236569157	-0,0608242387291	-0,0605
2015	0,0000000394255	-0,0075	0,3138	-0,0000000059927	-0,0001198823939	-0,0636999178965	-0,0638
2016	0,0000000375742	0,0046	0,3219	-0,0000000057113	0,0000732962343	-0,0653457998548	-0,0653
2017	0,0000000406101	0,0095	0,4630	-0,0000000061727	0,0001520681635	-0,0939890119288	-0,0938
Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)							
2013	0,0000000774507	0,0759	0,0969	-0,0000000117725	0,0012149242900	-0,0196772397491	-0,0185
2014	0,0000000616908	0,1445	0,0780	-0,0000000093770	0,0023118792021	-0,0158291030442	-0,0135
2015	0,0000000631291	-0,0963	0,0823	-0,0000000095956	-0,0015408890184	-0,0167118955915	-0,0183
2016	0,0000000598751	-0,2447	0,0054	-0,0000000091010	-0,0039154966278	-0,0011050148370	-0,0050
2017	0,0000000397705	-0,0097	0,0051	-0,0000000060451	-0,0001549890965	-0,0010314910688	-0,0012
Gema Grahasarana Tbk (GEMA)							
2013	0,0000000000023	0,1406	0,1746	-0,0000000000004	0,0022488572253	-0,0354492287040	-0,0332
2014	0,0000000000026	-0,0289	0,1986	-0,0000000000004	-0,0004631221947	-0,0403112036651	-0,0408
2015	0,0000000000024	0,3977	0,1815	-0,0000000000004	0,0063634562082	-0,0368491552838	-0,0305
2016	0,0000000000022	0,1912	0,6127	-0,0000000000003	0,0030586105202	-0,1243780696412	-0,1213
2017	0,0000000000015	-0,0809	0,4408	-0,0000000000002	-0,0012940787637	-0,0894811515414	-0,0908

Sumber: Data diolah penulis, 2019

$$NDA_{it} = a_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + a_2 \left(\frac{([REV_{it} - REV_{it-1}] - [REC_{it} - REC_{it-1}])}{A_{it-1}} \right) + a_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Lampiran 10 Data Perhitungan Manajemen Laba (*Discretionary Accruals*)

No.	Tahun	Nama dan Kode Perusahaan	TAit/Ait-1	NDAit	Discretionary Accruals (DA)
1.	2013	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)	0,1082	-0,0286	0,1368
	2014		0,0332	-0,0372	0,0703
	2015		-0,0323	-0,0357	0,0035
	2016		-0,0270	-0,0372	0,0102
	2017		0,1200	-0,0381	0,1581
2.	2013	United Tractor Tbk (UNTR)	-0,1475	-0,1115	-0,0361
	2014		-0,0789	-0,0819	0,0031
	2015		-0,1533	-0,0607	-0,0926
	2016		-0,0794	-0,0570	-0,0224
	2017		-0,0669	-0,0688	0,0019
3.	2013	Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)	0,1678	-0,0415	0,2093
	2014		0,0459	-0,0337	0,0796
	2015		-0,0216	-0,0303	0,0086
	2016		0,0655	-0,0357	0,1012
	2017		0,0242	-0,0343	0,0586
4.	2013	Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)	0,0400	-0,0520	0,0921
	2014		-0,0013	-0,0391	0,0379
	2015		-0,0150	-0,0466	0,0316
	2016		0,0683	-0,0482	0,1165
	2017		0,0069	-0,0526	0,0595
5.	2013	Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)	-0,1949	-0,0628	-0,1321
	2014		-0,0993	-0,0672	-0,0321
	2015		-0,1598	-0,0760	-0,0837
	2016		-0,1548	-0,0835	-0,0713
	2017		-0,1619	-0,0728	-0,0891
6.	2013	Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)	-0,1082	-0,0709	-0,0373
	2014		-0,1296	-0,0643	-0,0653
	2015		-0,0705	-0,0604	-0,0101
	2016		-0,0762	-0,0557	-0,0205
	2017		-0,0958	-0,0548	-0,0410
7.	2013	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)	-0,1371	-0,0898	-0,0473
	2014		0,1641	-0,0796	0,2437
	2015		0,1133	-0,0962	0,2095
	2016		-0,0118	-0,1044	0,0926
	2017		-0,0438	-0,0872	0,0434
8.	2013	Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)	0,0413	-0,0350	0,0763
	2014		0,0817	-0,0564	0,1380
	2015		0,0020	-0,0621	0,0642
	2016		-0,0333	-0,0672	0,0339
	2017		-0,0443	-0,0752	0,0310

9.	2013	Surya Citra Media Tbk (SCMA)	0,0039	-0,0366	0,0405
	2014		0,0672	-0,0382	0,1055
	2015		0,0031	-0,0409	0,0440
	2016		0,0277	-0,0423	0,0700
	2017		0,0139	-0,0437	0,0577
10.	2013	Metrodata Electronics Tbk (MTDL)	0,1004	0,0058	0,0946
	2014		-0,0129	-0,0007	-0,0122
	2015		0,2135	-0,0014	0,2149
	2016		-0,1345	-0,0093	-0,1253
	2017		0,0762	-0,0082	0,0844
11.	2013	Global Mediacom Tbk (BMTR)	-0,0265	-0,0493	0,0228
	2014		-0,0121	-0,0605	0,0484
	2015		-0,0771	-0,0638	-0,0133
	2016		-0,1317	-0,0653	-0,0664
	2017		-0,1348	-0,0938	-0,0409
12.	2013	Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)	0,0618	-0,0185	0,0802
	2014		0,0513	-0,0135	0,0648
	2015		0,0593	-0,0183	0,0776
	2016		0,3240	-0,0050	0,3290
	2017		0,0472	-0,0012	0,0483
13.	2013	Gema Grahasarana Tbk (GEMA)	0,0058	-0,0332	0,0390
	2014		0,0279	-0,0408	0,0687
	2015		0,0393	-0,0305	0,0698
	2016		0,1126	-0,1213	0,2339
	2017		0,0903	-0,0908	0,1811

Sumber: Data diolah penulis, 2019

$$DA_{it} = \left(\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} \right) - NDA_{it}$$

Lampiran 11 Data Perhitungan Agresivitas Pajak

(Dalam Rupiah Penuh)

No.	Tahun	Nama dan Kode Perusahaan	Total Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Pendapatan sebelum Pajak (Rp)	Effective Tax Rate (ETR)
1.	2013	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)	90.194.862.850	301.161.873.703	0,2995
	2014		99.019.956.472	319.509.563.207	0,3099
	2015		54.474.454.965	291.109.438.494	0,1871
	2016		70.407.855.769	402.068.042.408	0,1751
	2017		44.938.762.000	354.886.780.000	0,1266
2.	2013	United Tractor Tbk (UNTR)	1.788.559.000.000	6.587.337.000.000	0,2715
	2014		1.781.888.000.000	6.621.858.000.000	0,2691
	2015		1.400.307.000.000	4.192.746.000.000	0,3340
	2016		1.625.553.000.000	6.730.030.000.000	0,2415
	2017		2.849.335.000.000	10.522.657.000.000	0,2708
3.	2013	Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)	119.989.706.858	62.2993.945.777	0,1926
	2014		132.985.646.378	681.878.411.656	0,1950
	2015		151.738.046.343	736.611.510.331	0,2060
	2016		156.977.479.209	863.127.561.485	0,1819
	2017		179.293.532.722	959.980.347.383	0,1868
4.	2013	Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP)	21.481.735.000	97.361.926.000	0,2206
	2014		26.401.743.000	141.091.148.000	0,1871
	2015		9.468.661.000	52.490.576.000	0,1804
	2016		26.260.017.000	100.896.941.000	0,2603
	2017		26.108.238.000	115.130.429.000	0,2268
5.	2013	Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)	10.307.000.000	77.633.000.000	0,1328
	2014		36.491.000.000	175.115.000.000	0,2084
	2015		42.051.000.000	187.897.000.000	0,2238
	2016		52.454.000.000	254.376.000.000	0,2062
	2017		20.437.000.000	129.235.000.000	0,1581
6.	2013	Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS)	67.163.000.000	457.698.000.000	0,1467
	2014		33.049.000.000	388.124.000.000	0,0852
	2015		28.566.000.000	364.620.000.000	0,0783
	2016		56.586.000.000	465.065.000.000	0,1217
	2017		60.012.000.000	466.592.000.000	0,1286
7.	2013	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE)	13.907.021.761	54.651.272.944	0,2545
	2014		13.455.389.528	67.320.128.545	0,1999
	2015		23.940.877.320	89.256.483.493	0,2682
	2016		18.972.539.344	98.552.704.713	0,1925
	2017		28.604.384.476	110.555.734.896	0,2587
8.	2013	Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)	583.687.000.000	2.393.529.000.000	0,2439
	2014		660.347.000.000	2.543.779.000.000	0,2596
	2015		403.810.000.000	1.680.778.000.000	0,2403
	2016		669.977.000.000	2.152.932.000.000	0,3112

	2017		848.104.000.000	2.415.650.000.000	0,3511
9.	2013	Surya Citra Media Tbk (SCMA)	448.138.872.000	1.764.094.660.000	0,2540
	2014		468.817.653.000	1.917.091.878.000	0,2445
	2015		513.469.780.000	2.038.466.687.000	0,2519
	2016		509.922.953.000	2.023.551.865.000	0,2520
	2017		464.295.437.000	1.782.043.501.000	0,2605
10.	2013	Metrodata Electronics Tbk (MTDL)	70.559.388.293	240.790.127.214	0,2930
	2014		84.203.873.818	353.196.695.071	0,2384
	2015		90.105.000.000	416.739.000.000	0,2162
	2016		106.479.000.000	429.356.000.000	0,2480
	2017		94.242.000.000	468.483.000.000	0,2012
11.	2013	Global Mediacom Tbk (BMTR)	481.817.000.000	1.511.463.000.000	0,3188
	2014		627.539.000.000	1.917.547.000.000	0,3273
	2015		331.179.000.000	614.618.000.000	0,5388
	2016		625.635.000.000	1.412.175.000.000	0,4430
	2017		971.944.000.000	2.026.069.000.000	0,4797
12.	2013	Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)	42.263.000.000	391.351.000.000	0,1080
	2014		133.165.000.000	1.197.975.000.000	0,1112
	2015		224.857.000.000	1.676.469.000.000	0,1341
	2016		881.710.000.000	6.585.135.000.000	0,1339
	2017		79.292.000.000	3.187.469.000.000	0,0249
13.	2013	Gema Grahasarana Tbk (GEMA)	14.850.839.686	33.393.745.010	0,4447
	2014		14.144.390.062	32.203.936.217	0,4392
	2015		5.736.244.561	30.658.311.155	0,1871
	2016		4.631.091.058	35.357.713.108	0,1310
	2017		3.132.743.392	27.038.693.862	0,1159

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan (2019)

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$